

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA MENURUT  
UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA**

**(STUDI KASUS DESA BONTOSUNGGU KECAMATAN BONTOHARU  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR)**



Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum  
(S.H.) Prodi Ilmu Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Alauddin Makassar

Oleh:

**NURUL MUAMMAR**

**10400116007**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAKASSAR**

**2020**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI



Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nurul Muammar  
Nim : 10400116007  
Tempat/Tgl.Lahir : Makassar, 24 Juni 1998  
Jurusan : Ilmu Hukum  
Fakultas : Syariah dan Hukum  
Alamat : Jalan Poros Malino  
Judul : Efektifitas Pelaksanaan Pemberhentian Kepala Desa Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa ( Studi Kasus Desa Bontosunggu Kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar 26 Maret 2021

Penyusun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ALAUDDIN  
MAKASSAR

NURUL MUAMMAR







10400116007

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Efektifitas Pelaksanaan Pemberhentian Kepala Desa Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa ( Studi Kasus Desa Bontosunggu Kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar)” yang disusun oleh Nurul Muammar, Nim 10400116007, mahasiswa jurusan Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertanggungjawabkan pada sidang *Munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 12 Januari 2021, dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Alauddin Makassar dengan beberapa perbaikan.


Makassar, 26 Maret 2021 M  
13 Sya’ban 1442 H

### DEWAN PENGUJI

Ketua	: Dr. H. Muammar Muhammad Bakry, Lc., M.Ag.	(  )
Sekretaris	: Dr. Hj. Rahmatiah HL, M.Pd.	(  )
Munaqisy I	: Ahkam Jayadi, S.H., M.H.	(  )
Munaqisy II	: Ashabul Kahfi, S.H., M.H..	(  )
Pembimbing I	: Dr. Jumadi, M.H.	(  )
Pembimbing II	: Dr. Andi Safriani, S.H.,M.H.	(  )

Diketahui Oleh:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin  
Makassar

  
Dr. H. Muammar Muhammad Bakry, Lc., M.Ag.  
NIP. 19731122 200012 1 002

## KATA PENGANTAR



Tiada kata yang paling pantas dan paling mulia di ucapkan selain puji dan syukur atas kehadiran Allah Swt. Karena berkat rahmat, hidayah serta kekuatan serta kesehatan yang diberikan sehingga penyusun dapat selalu semangat dan kuat dalam menyelesaikan karya ilmiah penyusunan skripsi yang berjudul “ **Efektivitas Pelaksanaan Pemberhentian Kepala Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa ( Studi Kasus Desa Bontosunggu Kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar )** .

Shalawat serta salam tak lupa pula kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta keluarga tercinta dan semua orang-orang yaang senantiasa mengikuti jejak beliau.

Adapun maksud dan tujuan penyusunan tugas akhir ini ialah untuk memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar. Dalaam penyusunan skripsi ini penyusun mendasarkan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh dari bangku perkuliahan, khususnya dalam pendidikan di Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar serta hasil penelitian dan wawancara yang telah dilakukan oleh penyusun di Inspektorat Daerah.

Dalam penyusunan skripsi ini tentunya penyusun sangat banyak mendapat bantuan, bimbingan dan pengarahan dari berbagai pihak, baik secara spiritual maupun moril. Maka atas segala bantuan yaang telah diberikan kepada saya, pada kesempatan kali ini saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Yth :

1. Kedua orang tua saya yang sangat saya cintai dan hormati Bapak Drs. Muhammad Nursan dan Ibu Sitti Hadawiyah yang telah memberikan saya cinta dan kasih sayangnya sejak lahir hingga dewasa, yang telah mengajarkan saya arti hidup, arti perjuangan, dan yang telah membentuk tulang serta mental saya agar dapat tetap kokoh dalam menerjang segala badai yang akan saya hadapi, dan yang telah membiayai pendidikan dan segala kebutuhan hidup saya mulai dari taman kanak-kanak hingga dewasa bahkan saat saya berada di perantauan demi tercapainya cita-cita dan impian saya. Begitu banyak jasa-jasa serta pengorbanan yang telah kalian lakukan sehingga saya tidak mampu menuliskan semuanya dalam kata pengantar ini. Hanya doa yang bisa saya panjatkan, semoga Allah Swt senantiasa memberikan kesehatan dan membalas semua yang kalian berikan kepada saya.
2. Bapak Prof. H. Hamdan Juhannis MA Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
3. Bapak Dr. H. Muammar Muhammad Bakry, Lc., M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
4. Bapak Dr. Rahman Syamsuddin, M.H Ketua Jurusan Ilmu Hukum dan orang tua penulis di jurusan Ilmu Hukum yang senantiasa membimbing dengan penuh kesabaran dan penuh candaan.
5. Bapak Dr. Jumadi, M.H sebagai Dosen Fakultas Syariah sekaligus Pembimbing I yang perhatian dan senantiasa membimbing dengan sabar.
6. Ibu Dr. Andi Safriani, S.H., M.H sebagai Dosen Fakultas Syariah dan Hukum sekaligus Pembimbing II yang perhatian dan senantiasa sabar.
7. Bapak Ahkam Jayadi, S.H., M.H sebagai Dosen Fakultas Syariah dan Hukum sekaligus Penguji I terima kasih banyak atas perhatian dan masukan-masukannya.

8. Bapak Ashabul Kahfi, S.H., M.H sebagai Dosen Fakultas Syariah dan Hukum sekaligus Penguji II terima kasih banyak atas perhatian dan masukan-masukannya.
9. Seluruh dosen, pejabat dan staf Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar pada umumnya dan dosen jurusan Ilmu Hukum pada khususnya yang senantiasa mengajar penulis.
10. Terimakasih kepada Nurlia yang selalu menghadapi saya dengan sabar dan setia mensupport, menemani, menyemangati dan banyak membantu serta menutupi kekurangannya dalam pengurusan dan penulisan skripsi ini.
11. Sahabat-sahabat terbaik saya yang mendoakan, membantu dan memotivasi saya.
12. untuk semua yang tak sempat penulis sebutkan satu persatu, serta teman-teman di Fakultas Syariah dan Hukum UINAM khususnya kelas ILMU HUKUM A.
13. Dan kepada semua pihak yang tidak penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan dukungan dan motivasi selama penyusunan skripsi ini.

Semoga Allah swt memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Akhirnya hanya kepada Allah swt penulis serahkan segalanya. Mudah-mudahan skripsi ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat, dan juga kepada penulis sendiri, serta umumnya bagi kita semua.

Makassar, 14 November 2020  
Penyusun

Nurul Muammar

Nim: 10400116007

## DAFTAR ISI

SAMPUL .....	
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI.....	iv
PEDOMAN LITERASI.....	vi
ABSTRAK.....	xii
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus .....	10
C. Rumusan Masalah.....	12
D. Kajian Pustaka .....	12
E. Tujuan dan Kegunaan penelitian .....	14
 BAB II TINJAUAN TEORITIS.....	 15
A. Pemerintahan Daerah.....	15
1. Hak Daerah otonom.....	18
2. Kewajiban Daerah Otonom .....	18
B. Pemerintahan Desa .....	21
C. Kepala Desa.....	22
1. Pemilihan Kepala Desa.....	27
2. Pemberhentian Kepala Desa.....	30
D. Pengertian Korupsi .....	32
 BAB III METODE PENELITIAN .....	 35
A. Jenis dan Lokasi Penelitian .....	35
1. Jenis Penelitian .....	35
2. Lokasi Penelitian .....	35
B. Pendekatan Penelitian.....	35
C. Sumber Data .....	35
D. Metode Pengumpulan Data .....	36
E. Instrumen Penelitian.....	36
F. Teknik pengelolaan Data dan analisis data .....	37
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	 38
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	38

1. Kondisi Geografis.....	38
2. Luas Wilayah.....	39
3. Visi dan Misi .....	39
B. Alasan Pemberhentian Kepala Desa.....	41
1. Meninggal Dunia.....	43
2. Penyalagunaan Anggaran Desa .....	45
C. Prosedur Pemberhentian kepala Desa .....	52
1. BPD ( Badan Permusyawaratan Desa ).....	52
2. Inspektorat Daerah.....	54
 BAB V PENUTUP.....	 59
A. Kesimpulan.....	59
B. Implikasi Penelitian.....	60
 DAFTAR PUSTAKA .....	 61
LAMPIRAN.....	64

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
 MAKASSAR



## PEDOMAN TRANSLITERASI

### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	Ta	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>ḍammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَي	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	Ai	a dan i
اِو	<i>fathah</i> dan wau	Au	a dan u

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...   إ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
ي	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	I	i dan garis di atas
و	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	Ū	u dan garis di atas

#### 4. Tā' Marbūṭah

*Transliterasi* untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, yang transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu transliterasinya dengan (h).

#### 5. Syaddah (Tasydid)

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan

dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Jika huruf ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ي), maka ia ditransliterasikan seperti huruf *maddah* menjadi (i).

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam ma'arifah* (ا). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

## 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.=

## 9. Lafz al-Jalālah (هلا)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Adapun *tā' marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepadanya *al-Jalāl*

ditransliterasi dengan huruf [t].

#### 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK,DP, CDK, dan DR).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ALAUDDIN  
MAKASSAR

## ABSTRAK

**Nama : Nurul Muammar**  
**NIM : 10400116007**  
**Fak/Jurusan : Fakultas Syari'ah dan hukum / Ilmu Hukum**  
**Judul Skripsi : Efektivitas Pelaksanaan Pemberhentian Kepala Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa ( Studi Kasus Desa Bontosunggu Kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar)**

---

Penelitian ini berjudul Efektivitas Pelaksanaan Pemberhentian Kepala Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus Desa Bontosunggu Kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar) yang bertujuan untuk mengetahui apa alasan pemberhentian serta bagaimana pelaksanaan pemberhentian kepala desa di desa Bontosunggu Kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar.

Jenis penelitian penelitian yang digunakan adalah penelitian Yuridis-Empiris dengan kata lain adalah penelitian hukum sosiologis dan dapat pula disebut dengan penelitian lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, Yang menjadi alasan seringnya terjadi Pemberhentian Kepala Desa di Desa Bontosunggu Kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar adalah yang pertama meninggal dunia. Dikarenakan kematian yang datang tanpa bisa diduga-duga membuat salah satu faktor kekosongan jabatan dalam pemerintahan desa yang berakhir pada pemberhentian dan mengangkat penjabat kepala desa yang baru untuk mengisi kekosongan tersebut. Dan yang kedua adalah penyalagunaan dana desa, yang dimana melihat anggaran desa yang cukup banyak membuat beberapa orang tergiur untuk memanfaatkan setiap anggaran yang masuk ke desa untuk kepentingan dan keuntungan pribadi yang dapat berdampak negatif terhadap keuangan negara terutama desa. Dan untuk mencapai efektivitas suatu Undang-Undang tentu memerlukan kesadaran dari pihak-pihak yang akan menjalankan setiap peraturan perundang-undangan tersebut. Seperti misalnya dalam hal pemberhentian kepala desa yang tentunya tidak dapat di berhentikan secara arogan, akan tetapi telah di atur dalam peraturan perundang-undangan dan beberapa peraturan lainnya seperti peraturan daerah, peraturan menteri dalam negeri dan peraturan-peraturan lainnya. Dalam peraturan perundang-undangan telah di jelaskan tata cara pemberhentian kepala desa mulai dari pelaporan sampai dengan pemeriksaan terhadap kepala desa yang bersangkutan sebelum di putusan untuk diberhentikan.

**Kata Kunci: Efektivitas, Pelaksanaan, Pemberhentian**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### ***A. Latar Belakang Masalah***

Indonesia adalah negara kesatuan yang di mana tidak akan ada suatu daerah atau wilayah di dalam lingkungannya yang berbentuk negara pula. Akan tetapi, wilayah-wilayah di Indonesia di bagi menjadi daerah-daerah provinsi dan daerah-daerah provinsi tersebut dibagi lagi menjadi daerah-daerah yang lebih kecil. Hal tersebut sesuai dengan yang diatur oleh dasar negaranya bahwa Indonesia adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas beberapa daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan Undang-Undang.<sup>1</sup>

Daerah-daerah yang telah dibagi itu bersifat otonom dan administratif, sesuai dengan yang telah diatur oleh undang-undang yang selanjutnya disebut Pemerintahan Daerah. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintahan daerah dari DPRD menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>2</sup>

Setiap daerah yang berada dalam lingkup wilayah Indonesia diberikan wewenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang selanjutnya disebut otonomi daerah.<sup>3</sup> Yang dimana daerah-daerah tersebut disebut juga dengan daerah otonom, yang dimana daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang

---

<sup>1</sup> Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945

<sup>2</sup> Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

<sup>3</sup> Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah



berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>4</sup> Tujuan diberikannya wewenang oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah adalah untuk melancarkan pokok-pokok penyelenggaraan pemerintahan pusat di daerah sehingga dapat mencapai efektivitas dan efisiensi dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat serta dapat meningkatkan daya saing antar daerah dalam proses pertumbuhan. Tujuan lain pemberian otonomi kepada daerah berorientasi kepada pembangunan, yaitu pembangunan dalam arti luas, yang meliputi segala segi kehidupan dan penghidupan. Dengan demikian, otonomi daerah lebih mengarah kepada kewajiban daripada hak. Hal ini berarti bahwa setiap daerah berkewajiban melancarkan segala jalan menuju pembangunan dengan sungguh-sungguh dan dengan penuh rasa tanggungjawab sebagai sarana untuk terwujudnya cita-cita bangsa, yaitu masyarakat yang adil dan makmur, baik materiil maupun spiritual.

Daerah otonom di berikan wewenang serta berhak mengatur dan mengurus wilayahnya sendiri sesuai dengan asas desentralisasi, asas dekonsentrasi, dan asas tugas pembantuan, yang dimana ketiganya merupakan prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan otonomi daerah. Asas desentralisasi adalah asas yang menyatakan penyerahan sejumlah urusan pemerintahan dari Pemerintah Pusat atau dari pemerintah daerah tingkat yang lebih tinggi kepada pemerintah daerah tingkat yang lebih rendah sehingga menjadi urusan rumah tangga daerah itu. Asas dekonsentrasi adalah asas yang menyatakan pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat atau kepala wilayah atau kepala instansi vertikal tingkat yang lebih tinggi kepada pejabat-pejabat daerah. Asas tugas pembantuan adalah asas yang menyatakan tugas turut serta dalam pelaksanaan urusan pemerintah yang ditugaskan kepada pemerintah daerah dengan kewajiban mempertanggungjawabkannya

---

<sup>4</sup> Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

kepada yang memberi tugas.<sup>5</sup>

Setiap daerah di pimpin oleh kepala daerah yang mempunyai dua fungsi yaitu: Sebagai kepala daerah otonom yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah dan Sebagai kepala wilayah yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan umum yang mejadi tugas Pemerintahan Pusat. Oleh karena itu, menurut hierarki seorang kepala daerah bertanggungjawab kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri. Hal ini telah sesuai dengan Bab III, Pasal 4 ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Maka hal ini berarti Presiden/Mandaris MPR adalah penanggungjawab tertinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.

Apabila di tinjau dari dari segi ketatalaksanaan, maka sangatlah tepat apabila kepala daerah ini hanya mengenal satu garis pertanggungjawaban. Maka, dengan demikian seorang kepala daerah tidak bertanggungjawab kepada DPRD. Meskipun demikian, kepala daerah berkewajiban memberikan keterangan bertanggungjawaban tentang pelaksanaan Pemerintahan Daerah yang dipimpinnya kepada DPRD, sebagai salah satu unsur Pemerintahan Daerah agar selalu dapat mengikuti serta mengawasi jalannya pemerintahan di suatu daerah.

Melihat dari uraian di atas, dapat dikatakan bahwa kepala daerah bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri. Sehingga dapat di simpulkan bahwa Kepala Daerah dan Menteri Dalam Negeri mempunyai kedudukan yang sama yaitu sebagai pembantu Presiden. Hanya saja, Menteri Dalam Negeri adalah pembantu Presiden pada tingkat pusat, sedangkan Kepala Daerah adalah pembantu Presiden pada tingkat Daerah. Menteri Dalam Negeri bertanggung jawab langsung kepada Presiden, sedangkan Kepala Daerah bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri.

---

<sup>5</sup> C.S.T Kansil & Christine S.T Kansil, *Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 3-4

Berkaitan dengan pengangkatan dan pemilihan Kepala Daerah tentunya harus dipertimbangkan dengan sungguh-sungguh agar dapat memenuhi syarat-syarat kedua fungsinya sesuai dengan yang tertera di atas. Sebagai kepala daerah otonom, seorang kepala daerah harus mendapat dukungan dari rakyat dimana ia akan memimpin. Sebagai seorang kepala pemerintahan di tingkat daerah, ia juga harus mempunyai kecakapan dalam bidang pemerintahan dan dapat di percaya sepenuhnya oleh pemerintah pusat.

Seperti yang dikemukakan sebelumnya, tujuan pembentukan daerah otonom adalah untuk pemberdayaan masyarakat daerah, peningkatan kesejahteraan rakyat, dan dapat memanfaatkan potensi sumber-sumber pendapatan secara efisien dan efektif sehingga membuka peluang untuk memajukan daerahnya, serta dapat meningkatkan kemampuan kinerja perangkat daerahnya. Maka untuk mewujudkan masyarakat yang adil, sejahtera dan demokratis maka di buatlah Undang-Undang yang membahas tentang pemerintahan daerah dengan tujuan mengefektivaskan penyelenggaraan pemerintahan daerah. maka dari itu lahirlah Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian di persempit lagi dengan adanya PERDA (Peraturan Daerah) di setiap daerah sesuai dengan kebutuhan daerahnya masing-masing, yang didalamnya membahas tentang segala aspek yang harus dilaksanakan pemerintah daerah demi tercapainya efektivitas dan efesiansi dalam pelayanan kepada masyarakat. Salah satu yang menjadi pembahasan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 adalah tentang desa yang dimana dalam pemerintahan kabupaten/kota di bentuk pemerintahan desa sebagai daerah otonomi terendah dalam susunan Pemerintahan Negara Republik Indonesia yang terdiri dari kepala desa dan perangkat desa.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerinthan Daerah, maka daerah membuka ruang politik agar masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan, baik pada tingkat nasional, regional, daerah maupun pada tingkat pemerinthan desa. Pemerintahan desa merupakan sub sistem dari

penyelenggaraan pemerinthan, sehingga desa telah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Kepala desa bertanggungjawab kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta menyampaikan segala bentuk laporan tugas kepada Bupati/Walikota.

Stabilitas pemerintahan tidak lepas dari peran pemerintahan desa karena desa mempunyai peran penting untuk kelangsungan hidup seluruh masyarakat negara. Desa adalah merupakan satu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia.<sup>6</sup> Desa merupakan candela negara terbentuknya negara Menurut Aristoteles suatu persekutuan yang mempunyai tujuan bersama untuk dapat berkembang, karena negara merupakan penggabungan antara keluarga menjadi suatu kelompok yang lebih besar, kelompok itu bergabung lagi hingga menjadi desa. Sehingga desa juga mempunyai peran penting untuk kelangsungan hidup seluruh masyarakat Negara<sup>7</sup> .Desa merupakan bentuk pemerintahan terendah dalam susunan pemerintahan dalam lingkup Kabupaten yang dijalankan secara bersama-sama oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa serta perangkat-perangkat desa yang lain sebagai perwujudan demokrasi. Pemerintah desa dapat melakukan kerja sama dengan desa lain dalam hal pembanguna yang diatur oleh keputusan bersama oleh desa-desa yang bersangkutan yang dilaporkan kepada camat sebagai kepala pemerintahan diwilayah kecamatan. Sama halnya ketika pemerintah kabupaten/kota yang ingin melakukan pembangunan di desa tentunya

---

<sup>6</sup> Richa Rahmatin,"*Dinamika Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Terkait Disfungsi Jabatan Kepala Desa ( Studi Kasus di Desa Bangunrejo Kabupaten Tuban)*". Jurnal Hukum, Februari 2015, hal. 3

<sup>7</sup> Richa Rahmatin,"*Dinamika Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Terkait Disfungsi Jabatan Kepala Desa ( Studi Kasus di Desa Bangunrejo Kabupaten Tuban)*". Jurnal Hukum, Februari 2015, hal. 4

harus mengikutsertakan pemerintahan desa dengan memperhatikan kepentingan masyarakat desa; kewenangan desa; kelancaran pelaksanaan investasi; kelestarian lingkungan hidup serta kepentingan umum sesuai yang diatur dalam perda.

Dalam menjalankan pemerintahan, sebuah desa tentunya haruslah memiliki pemimpin yang di sebut kepala desa. Kepala desa merupakan figur pemimpin desa dimana seorang kepala desa tentunya mempunyai peranan penting dan sangat besar dalam memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa, membina kehidupan masyarakat desa, memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa, mendamaikan perselisihan yang terjadi antara masyarakat desa, serta membina perekonomian desa agar dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan desa yang di pimpinnya. Kepala desa dalam memimpin tentunya sangat menentukan keberhasilan desa dalam mencapai tujuan yang ingin di capai atau yang di cita-citakan. Oleh karena itu pemilihan kepala desa dilakukan oleh panitia pemilihan kepala desa memiliki peranan dan pengaruh terhadap keberlangsungan pembangunan serta kesejahteraan masyarakat pedesaan. Kepala desa yang di pilih langsung oleh penduduk desa serta memenuhi syarat menjadi kepala desa yang tentunya telah diatur dalam perda tentang tata cara pemilihan kepala desa. Kepala desa yang telah memenuhi syarat tentunya harus melewati beberapa tahap yaitu pencalonan, pemungutan suara, dan penetapan sebelum kemudian dilantik oleh Bupati/WaliKota dan mengucapkan sumpah serta janji sebelum memegang jabatan sebagai kepala desa selama 6 tahun lamanya. Seorang kepala desa dalam menjalankan pemerintahan telah diatur dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang berpedoman pada Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, yang dimana kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan

masyarakat desa.<sup>8</sup>

Seorang kepala desa bertanggungjawab atas kelancaran penyelenggaraan dalam rumah tangga dan segala sesuatu yang bersangkutan dengan pemerintahan desa. Salah satu tugas dan kewajiban kepala desa yang telah di atur dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 adalah membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikan agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa; mengembangkan sumber pendapatan; serta mengelola keuangan dan aset desa.<sup>9</sup> Desa merupakan daerah otonom terendah dalam susuna pemerintahan yang sudah sepatutnya menerima anggaran yang besar untuk kemakmuran dan pemerataan pembangunan di tingkat desa. Besarnya anggaran yang masuk ke desa membuat aparatur desa kian memanfaatkan hal tersebut untuk menggunakan dana tersebut kedalam kepentingan pribadi masing-masing. Penyalagunaan Alokasi Dana Desa kian marak terjadi, tidak sesuai Alokasi Dana Desa dengan Rencana Anggaran Biaya semakin memperkuat bahwa adanya dana desa yang diselewengkan oleh perangkat desa, sehingga perangkat desa diduga menyalagunakan wewenang atau diduga melakukan korupsi atas tugasnya dalam mengelola keuangan desa.

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.<sup>10</sup> Salah satu sumber pendapatan desa adalah alokasi dana desa yang merupakan dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota, yang dimana paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten dan kota. Pada hakikatnya, dalam menjalankan tugasnya, dilarang menyalagunakan wewenangnya. Bagi yang melanggar kepala desa yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi administratif. Dalam hal sanksi administratif tidak terlaksana, maka dapat dilakukan pemberhentian sementara yang di lanjutkan dengan

---

<sup>8</sup> Pasal 26 angka 1 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa

<sup>9</sup> Pasal 26 angka 2-3 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa

<sup>10</sup> Pasal 71 Angka 1 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa

pemberhentian.

Berkaitan dengan penyalagunaan keungan desa, perbuatan tersebut dapat dikategorikan korupsi, karena hal tersebut adalah penyalagunaan wewenang yang berakibat merugikan keungan negara. Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah di ubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, berbunyi “ setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri senriri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalagunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keungan negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50 juta dan paling banyak Rp1 milyar”.<sup>11</sup>

Untuk menghindari terjadinya penyalagunaan wewenang serta penyalagunaan anggaran desa, pemerintah telah mengeluarkan peraturan-pertauran yang telah mengatur segala kewenangan serta larangan yang harus dilakukan dan tidak boleh di lakukan oleh kepala desa sebagaimana yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. akan tetapi beberapa peraturan tersebut baik yang diterbitkan di tingkat provinsi sampai ke tingkat desa, tidak dapat mengatasi permasalahan yang terjadi di masyarakat, terkhusus di tingkat desa yang masih memiliki adat yang kental. Sehingga masalah tentang pemberhentian kepala desa atas pelanggaran terhadap penyalagunaan wewenang masih sering terjadi dan tidak mendapat hukuman yang setimpal atas pelanggaran yang dilakukannya. Akibatnya hal yang serupa pun masih sering terjadi walaupun pemerintah telah mengeluarkan peraturan akan hal yang terkait.

Permasalahan pemberhentian kepala desa ini tentunya berdampak pada penyelenggaraann

---

<sup>11</sup>Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.



pemerintahan desa serta pembangunan desa. Setelah kepala desa yang telah resmi diberhentikan, maka bupati menunjuk PJ kepala desa sementara untuk melanjutkan visi misi kepala desa lama yang telah tertuang dalam Rencana pembangunan jangka Menengah ( RPJMDes ) yang dimana visi misi kepala desa yang lama dengan kepala desa yang baru belum tentu sama atau bisa jadi berbeda. Di sisi lain, kepala desa baru yang telah di tunjuk oleh bupati belum tentu menjadi pilihan masyarakat pula.

Pemerintah daerah dalam memberhentikan kepala desa pun tidak serta merta di berhentikan begitu saja. Terdapat tata cara serta mekanisme pemberhentian kepala desa sebelum kepala desa tersebut di berhentikan. Sebagaimana telah di atur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 atas Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2009 Tentang tata Cara Pemilihan Dan Pemberhentian Kepala Desa, serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Berdasarkan uraian di atas, terkhusus di Kabupaten Kepulauan Selayar sepuluh tahun terakhir (2010-2010) sering terjadi pemberhentian kepala desa yang tentunya memiliki dampak negatif bagi penyelenggaraan pemerintahan serta kehidupan sosial dan budaya masyarakat desa,terkhusus dalam sistem pemerintahan desa. Salah satu dampak negatif yang terjadi dari pemberhentian kepala desa ini ialah dalam segi pemerintahan ialah adanya kekosongan jabatan sehingga terhambatnya pembangunan desa. Maka, dalam hal ini penulis berupaya menganalisis apakah dengan adanya Undang-Undang No.6 Tahun 2014 ini mampu mengkomodir konflik-konflik yang terjadi akibat pemberhentian kepala desa.

Olehnya itu, penulis tertarik untuk menganalisis permasalahan yang terjadi menuangkannya ke dalam bentuk penelitian yang berjudul **“Efektifitas Pelaksanaan**



## **Pemberhentian Kepala Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. (Study Kasus Desa Bontosunggu Kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar”**

### ***B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus***

Fokus penelitian adalah batasan terhadap penelitian agar supaya jelas ruang lingkup yang akan diteliti. Fokus penelitian pada skripsi ini adalah efektivitas Undang-Undang Desa Terhadap Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Kepulauan Selayar. Dan untuk menghindari terjadinya kekeliruan pada penafsiran oleh pembaca terhadap variabel judul skripsi ini maka penulis terlebih dahulu akan mengemukakan beberapa pengertian kata serta istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini.

Kata “efektivitas” berasal dari bahasa Inggris “*effective*” dalam bahasa Indonesia memiliki makna “berhasil”. Dalam bahasa Belanda disebut “*effectief*” yang bermakna “berdaya guna”. Kata dasar dari efektivitas adalah efektif. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, efektivitas berarti 1. Hal berkesan atau berpengaruh; 2. (obat) kemujaraban, kemanjuran; 3. (usaha/tindakan) keberhasilan; 4. Undang-Undang, peraturan, dan sebagainya) hal mulai berlaku.<sup>12</sup>

Undang-Undang adalah salah satu sumber hukum yang berbentuk tertentu yang merupakan dasar berlakunya hukum secara formal. Undang-Undang adalah peraturan negara yang dibentuk oleh alat negara yang berwenang dan mengikat masyarakat. Undang-Undang dibedakan menjadi dua yaitu :

1. Undang-Undang Materil, adalah setiap peraturan perundang-undangan yang isinya langsung mengikat masyarakat secara umum.

---

<sup>12</sup> Peter Salim dan Yani Salam, *kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer* (Ed. 1, Jakarta; Modern English Press, 1991), h.376.

2. Undang-Undang Formil, adalah setiap peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh alat perlengkapan negara yang berwenang melalui tata cara dan prosedur yang berlaku.<sup>13</sup>

Menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 mengartikan bahwa pemberhentian atau pemutusan hubungan kerja adalah penghakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antar pekerja. Sedangkan menurut Moekijat mengartikan pemberhentian dengan pemutusan hubungan kerja seseorang karyawan dengan suatu organisasi perusahaan.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>14</sup> Sedangkan Kepala Desa adalah orang yang dipilih langsung oleh masyarakat setempat untuk memimpin jalannya penyelenggaraan pemerintahan di desa tersebut.

Kabupaten Selayar merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi selatan, terbentuk berdasarkan Undang-Undang nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822). Kemudian berubah nama menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan PP Nomor 59 Tahun 2008.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Petrus Soerjowinoto, *Ilmu Hukum, suatu pengantar buku panduan mahasiswa*, (Surabaya, CV. Garuda Mas Sejahtera, 2018) hlm 113-114

<sup>14</sup> Pasal 1 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

<sup>15</sup> Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar. "Selayang Pandang Selayar", official website <http://www.kepulauanselayarkab.go.id/hal-sejarah.html> (diakses pada tanggal 14 Februari 2020, Pukul 23:35 wita)

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang di dapat dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah yang Menjadi Alasan Pemberhentian Kepala Desa di Desa Bontosunggu Kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar ?
2. Bagaimana Prosedur Pelaksanaan Pemberhentian kepala Desa di Desa Bontosunggu Kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar ?

### D. Kajian Pustaka

Dari beberapa penelusuran terhadap penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh penulis. Tidak ditemukan penelitian yang sama secara spesifik dengan penelitian ini. Un, peneliti menemukan penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini. Penelitian-penelitian tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Rafiah Rusyda, Syarat-syarat Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa di Desa Banjararum, Kecamatan Kalibawang, Kabupaten Kulonprogo, Daerah Istimewah Yogyakarta. 2013. Penelitian ini memfokuskan kepada syarat-syarat pengangkatan dan pemberhentian kepala desa di desa Banjararum, Kecamatan Kalibawang, Kabupaten Kulonprogo menurut Peraturan Daerah No.6 Tahun 2010 tentang Tata Cara Kepala Desa.<sup>16</sup> Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis adalah mengenai prosedur pelaksanaan pemberhentian kepala desa serta yang menjadi alasan terhadap pemberhentian kepala desa tersebut. Sehingga dapat diketahui bahwa kedua penelitian ini tidaklah sama.
2. Tri Nurmalasari, Dampak Pergantian Kepala Desa Sebelum Habis Masa Jabatannya Terhadap Pelaksanaan Kewenangan Desa. 2019. Penelitian ini terfokus terhadap

---

<sup>16</sup> Rafiah Rusyda, *Syarat-syarat Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa di Desa Banjararum, Kecamatan Kalibawang, Kabupaten Kulonprogo, Daerah Istimewah Yogyakarta*, "Skripsi (Yogyakarta : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga , 2013).

dampak yang di timbulkan terhadap pergantian kepala desa terdapat penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan desa.<sup>17</sup> Sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti memfokuskan terhadap alasan-alasan kepala desa diberhentikan serta prosedur pemberhentian kepala desa yang dilakukan pemerintah. Sehingga dapat dilihat bahwa kedua penelitian ini tdk di temukan indikasi plagiat yang dilakukan oleh penulis.

3. Gesty Hasfadila Hikma Arani, Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Pemilihan Kepala Desa Dengan Hasil seri di Desa Klangonan Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik menurut Peraturan Bupati No.10 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa. Universitas Islam Negeri suna Ampel Surabaya. 2019. Penelitian ini memfokuskan terhadap bagaimana pemilihan kepala desa dengan hasil seri di desa Klangonan, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, menurut peraturan Bupati No. 10 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa serta bagaimana tinjauan fikih siyasah terhadap hasil pemilihan kepala desa di desa Klagonan, kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik. Sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti memfokuskan terhadap alasan pemberhentian kepala desa di desa Bontosunggu Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar serta prosedur pemberhentian kepala desa itu sendiri. Maka, dapat diketahui bahwa kedua penelitian ini tidak sama.
4. Jurnal Hukum, yang di tulis oleh Richa Rahmatin Dkk, tentang Dinamika Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Terkait Disfungsi Jabatan Kepala Desa (Studi Kasus di Desa Bangunrejo Kabupaten Tuban) yang di upload pada bulan februari

---

<sup>17</sup> Tri Nurmalasari, “*Dampak Pergantian Kepala Desa Sebelum Habis Masa Jabatannya Terhadap Pelaksanaan Kewenangan Desa*,” Skripsi ( Yogyakarta : Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa, 2019 ).

2015. Jurnal ini membahas tentang disfungsi jabatan kepala desa yang di gantikan sebelum masa jabatannya berakhir. Yang di mana bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis dinamika penyelenggaraan pemerintahan desa terkait disfungsi jabatan kepala desa serta menganalisis akibat penyelenggaraan pemerintahan desa dan pertanggungjawaban pemerintahan desa. Sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti terfokus kepada apa yang menjadi alasan pemberhentian kepala desa serta bagaimana prosedur pemberhentian kepala desa di desa Bontosunggu, Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar. Sehingga, dapat di ketahui bahwa penelitian ini tidak sama.

#### ***E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian***

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi alasan-alasan dari pemberhentian kepala desa di desa Bontosunggu, Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar.
2. Untuk mengetahui apakah prosedur pelaksanaan pemberhentian kepala desa sudah berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

## **BAB II**

### **TINJAUAN TEORETIS**

#### **A. Pemerintahan Daerah**

Pembentukan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Pasal 18 UUD Negara RI Tahun 1945, telah melahirkan beberapa produk undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang pemerintahan daerah, antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, dan terakhir Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.<sup>18</sup>

Secara substansial undang-undang tersebut mengatur bentuk-bentuk serta susunan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Secara normatif undang-undang tersebut telah mampu mengikuti perkembangan serta perubahan kepemimpinan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai zamannya. Salah satu contoh bahwa undang-undang mampu mengikuti perkembangan kepemimpinan sesuai zaman adalah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sebelum di berlakukannya undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yakni Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 dan undang-undang sebelumnya memberikan kedudukan kepala daerah sebagai pelaksana kekuasaan eksekutif, memiliki kewenangan lebih besar dari pada kekuasaan DPRD sebagai pelaksana kekuasaan legislatif. Maka dapat dikatakan bahwa kepala daerah tidak dapat diberhentikan oleh DPRD serta kepala daerah tidak bertanggungjawab sepenuhnya kepada DPRD.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah lahir dalam situasi retaknya reformasi di Indonesia yang telah diubah ke dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang pemerintahan Daerah. Lahirnya undang-undang tersebut memberikan DPRD kedudukan yang lebih kuat di banding dengan kekuasaan kepala daerah, dengan

---

<sup>18</sup> H. Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, h 54.

beberapa kewenangan yang di miliki, antara lain kewenangan memilih kepala daerah dan kewajiban kepala daerah untuk memberikan laporan pertanggungjawaban kepada DPRD mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah. Maka dapat di katakan telah terjadi perubahan penyelenggaraan pemerintahan daerah dari masa ke masa. Yang paling substansial adalah kewenangan yang dimiliki oleh para penyelenggara pemerintahan daerah, terkhusus lagi kepada hubungan lembaga eksekutif dan lembaga legislatif daerah sebagai unsur penting dalam penyelenggaran pemerintahan daerah.

Setiap daerah yang berada dalam lingkup wilayah indonesia di berikan wewenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang selanjutnya disebut otonomi daerah. Yang dimana daerah-daerah tersebut disebut juga dengan daerah otonom, yang dimana daerah otonom adalah kesatuan mayarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indinesia. Tujuan diberikannya wewenang oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah adalah untuk melancarkan pokok-pokok penyelenggaraan pemerintahan pusat di daerah sehingga dapat mencapai efektivitas dan efesiensi dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat serta dapat meningkatkan daya saing antar daerah dalam proses pertumbuhan. Tujuan lain pemberian otonomi kepada daerah berorientasi kepada pembangunan, yaitu pembangunan dalam arti luas,yang meliputi segala segi kehidupan dan penghidupan. Dengan demikian, otonomi daerah lebih mengarah kepada kewajiban daripada hak. Hal ini berarti bahwa setiap daerah berkewajiban melancarkan segala jalan menuju pembangunan dengan sungguh-sungguh dan dengan penuh rasa tanggungjawab sebagai sarana untuk terwujudnya cita-cita bangsa, yaitu masyarakat yang adil dan makmur, baik materil maupun spiritual.

Daerah otonom di berikan wewenang serta berhak mengatur dan mengurus wilayahnya sendiri sesuai dengan asas desentralisasi, asas dekonsentrasi, dan asas tugas pembantuan, yang dimana ketiganya merupakan prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan otonomi daerah. Asas desentralisasi adalah asas yang menyatakan penyerahan sejumlah urusan pemerintahan dari Pemerintah Pusat atau dari pemerintah daerah tingkat yang lebih tinggi kepada pemerintah daerah tingkat yang lebih rendah sehingga menjadi urusan rumah tangga daerah itu. Asas dekonsentrasi adalah asas yang menyatakan pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat atau kepala wilayah atau kepala instansi vertikal tingkat yang lebih tinggi kepada pejabat-pejabat daerah. Asas tugas pembantuan adalah asas yang menyatakan tugas turut serta dalam pelaksanaan urusan pemerintah yang ditugaskan kepada pemerintah daerah dengan kewajiban mempertanggungjawabkannya kepada yang memberi tugas.<sup>19</sup>

Untuk membentuk suatu susunan pemerintahan daerah itu sendiri, pemerintah bersama DPR telah menetapkan undang-undang yang mengatur pokok-pokok penyelenggaraan pemerintahan daerah otonom serta pokok-pokok penyelenggaraan penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi tugas pemerintah pusat di daerah. Selain itu juga di atur pokok-pokok penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan asas tugas pembantuan. Dalam penyelenggaran urusan pemerintahan daerah otonom mempunyai hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban ini bertujuan untuk mengatur dan bembatasi ruang gerak pemerintahan daerah agar supaya tidak melakukan penyelewengan kekuasaan atau bertindak semena-mena dalam menjalankan tugasnya. Hak dan kewajiban yang telah di atur dalam Undang-Undang anatar lain :

---

<sup>19</sup> C.S.T Kansil & Christine S.T Kansil, *Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 3-4



## **1. Hak Daerah Otonom**

- a. Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya
- b. Memilih pimpinan daerah
- c. Mengelola kekayaan daerah
- d. Memungut pajak daerah dan retribusi daerah
- e. Mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah
- f. Mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah dan;
- g. Mendapatkan hak lainnya yang di atur dalam peraturan perundang-undangan.

## **2. Kewajiban daerah otonom**

- a. Melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan, dan kerukunan nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- b. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat
- c. Mengembangkan kehidupan demokrasi
- d. Mewujudkan keadilan dan pemerataan
- e. Meningkatkan pelayanan dasar pendidikan
- f. Menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan
- g. Menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak
- h. Mengembangkan sistem jaminan sosial
- i. Menyusun perencanaan dan tata ruang daerah
- j. Mengembangkan sumber daya produktif di daerah
- k. Melestarikan lingkungan hidup
- l. Mengelola administrasi kependudukan
- m. Melestarikan nilai sosial budaya

- n. Membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya; dan
- o. Kewajiban lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.<sup>20</sup>

Untuk menjalankan pemerintahan, setiap daerah di pimpin oleh kepala pemerintahan yang di sebut kepala daerah. Kepala daerah dalam menjalankan pemerintahan di daerah di bantu oleh wakil kepala daerah dan perangkat daerah serta lembaga-lembaga pemerintahan yang ada dalam setiap daerah. Perangkat daerah provinsi terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dan lembaga teknis daerah lainnya. Sedangkan di tingkat kabupaten/Kota perangkat daerah terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, kelurahan/desa.

Untuk dapat menjadi seorang kepala daerah, seseorang diwajibkan memenuhi segala persyaratan tertentu yang dimana intinya adalah agar seorang Kepala Daerah selalu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki etika dan moral yang baik, berpengetahuan, serta berkemampuan sebagai pemimpin pemerintahan, berwawasan kebangsaan yang luas, serta mendapat kepercayaan dari masyarakat.

Dalam hal menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai kepala daerah, Gubernur bertanggung jawab kepada DPRD Provinsi, sedangkan dalam kedudukannya sebagai wakil pemerintahan, Gubernur bertanggung jawab kepada Presiden. Sementara itu, dalam penyelenggaraan otonomi daerah, di daerah Kabupaten dan Kota, Bupati/Walikota bertanggung jawab kepada DPRD Kabupaten/Kota dan berkewajiban memberikan laporan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri dalam rangka pembinaan dan pengawasan. Yang menjadi kewajiban kepala daerah antara lain :

- a. Mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

---

<sup>20</sup> Pasal 21 dan 22 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

- b. Memegang teguh Pancasila dan UUD 1945;
- c. Menghormati kedaulatan rakyat;
- d. Menegakkan seluruh perturan perundang-undangan;
- e. Meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat;
- f. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- g. Mengajukan Rancangan Peraturan Daerah dan menetapkan sebagai Peraturan Daerah bersama dengan DPRD;
- h. Kepala daerah memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
- i. Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, kepala daerah bertanggung jawab kepada DPRD;
- j. Kepala daerah wajib menyampaikan laporan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri dengan tembusan kepada Gubernur bagi kepala Daerah Kabupaten/Kota, sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun, atau jika di pandang perlu oleh kepala daerah atau apabila diminta oleh presiden;
- k. Kepala daerah wajib menyampaikan pertanggungjawaban kepada DPRD pada setiap akhir tahun anggaran;

Seorang kepala daerah juga dilarang :

- a. Turut serta dalam suatu perusahaan, baik milik swasta maupun milik negara/daerah, atau dalam yayasan bidang apapun juga;
- b. Membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan bagi dirinya, anggota keluarganya, kroninya, golongan tertentu, atau kelompok politiknya yang secara nyata merugikan kepentingan umum atau mendiskriminasikan warga negara dan golongan masyarakat lain;

- c. Melakukan pekerjaan lain yang memberikan keuntungan bagi dirinya, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berhubungan dengan daerah yang bersangkutan;
- d. Menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang patut dapat diduga akan mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- e. Menjadi advokat atau kuasa hukum dalam suatu perkara di pengadilan.

### **B. Pemerintahan Desa**

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>21</sup>

Menurut Soetardjo Kartohadikoesoemo, desa adalah suatu kesatuan hukum dimana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri. Hazairin berpendapat bahwa : “desa di Jawa dan Madura, nagari di Minangkabau sebagai masyarakat adat, yaitu masyarakat yang mempunyai kelengkapan untuk sanggup berdiri sendiri, yakni mempunyai kesatuan hukum, kesatuan penguasa, dan satuan lingkungan hidup berdasarkan hak bersama atas tanah dan air bagi semua anggotanya.”<sup>22</sup>

Dalam pembentukannya, desa dibentuk dengan memperhatikan syarat luas wilayahnya, jumlah penduduk, serta syarat lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan mengurus dan mengatur kepentingan masyarakatnya sendiri untuk mencapai kesejahteraan masyarakatnya berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang telah diakui oleh sistem pemerintahan nasional. Hak untuk mengatur dan mengurus urusan kepentingan masyarakat inilah yang

<sup>21</sup> Pasal 1 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

<sup>22</sup> Titik Triwulan, *Restorasi Hukum Tata Negara Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Prenadamedia, Depok, hal. 309

disebut dengan otonomi daerah. Sebagai wujud demokrasi maka didalam desa di bentuk pula yang namanya Badan Perwakilan Desa yang berfungsi sebagai lembaga legislatif dan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, serta Keputusan Kepala desa.

Dalam menjalankan pemerintahan, desa di pimpin oleh kepala desa dan di bantu oleh perangkat desa lainnya. Pemerintahan desa terdiri dari kepala desa dan lembaga musyawarah desa, serta perangkat desa terdiri dari sekretariat desa dan kepala-kepala dusun. Lembaga permusyawaratan desa adalah lembaga permusyawaratan/ permufakatan yang keanggotaannya terdiri atas kepala-kepala dusun, pimpinan lembaga-lembaga kemasyarakatan dan pemuka-pemuka masyarakat setempat.

Salah satu kewenangan desa ialah peningkatan pelayanan serta kesejahteraan masyarakat desa itu sendiri. Maka desa harus menggali segala potensi sumber daya alam yang ada di wilayahnya untuk dimanfaatkan sebagai pendapatan desa. Pemerintah desa perlu memiliki strategi pembangunan potensi sumber daya alam desa untuk menunjang pendapatan asli daerah.

### ***C. Kepala Desa***

Kepala desa adalah satu-satunya penguasa dalam pemerintahan desa. Sebutan terhadap kepala desa beragam sesuai dengan adat setempat. Dalam menjalankan tugasnya, desa dibantu oleh perangkat desa. Kepala desa bertugas melaksanakan dan menyelenggarakan urusan rumah tangga desa serta urusan pemerintahan desa, akan tetapi masih terdapat batasan-batasan dalam menjalankan tugasnya. Kepala desa tidak diperbolehkan membuat keinginan sendiri dalam menjalankan tugasnya. Sebelum membuat peraturan desa, seorang kepala desa harus meminta pendapat dari masyarakat desa dalam sebuah rapat desa, karena masyarakat merupakan unsur terpenting dalam sebuah desa. Dengan mendengarkan pendapat masyarakat proses penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa akan lebih baik karena

sesuai dengan keinginan serta kebutuhan masyarakat setempat yang memiliki perasaan persatuan yang sama. J.P Gillin mengatakan bahwa masyarakat kelompok manusia yang tersebar mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap dan perasaan persatuan yang sama. Masyarakat itu meliputi pengelempokan-pengelempokan yang kecil.<sup>23</sup>

Dalam tinjauan islam, mendengarkan pendapat masyarakat dalam sebuah musyawarah untuk proses pembangunan atau proses penyelenggaraan urusan pemerintahan di pandang perlu, dalam Al-qur'an surah Al Imran ayat 159 yang berbunyi :

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Terjemahan :

*“maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka, sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwakkal kepada-Nya. (QS Al Imran 159).*

Penjelasan dari ayat diatas adalah, dalam urusan duniawi seperti urusan politik, ekonomi, kemasyarakatan dan lain-lainnya, hendaklah melakukan musyawarah. Dengan bermusyawarah merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik karena mampu mendengarkan pendapat dari masyarakat untuk kepentingan bersama. Karena

---

<sup>23</sup> Risma Handayani, *Pembangunan Masyarakat Pedesaan*, Alauddin University Press, Makassar, Hlm 18.

dengan bermusyawarah pula akan terjaring aspirasi-aspirasi yang baru sehingga ada pendapat serta keinginan untuk menghargai segala perbedaan yang ada dalam masyarakat.

Seorang pemimpin yang baik dalam mengambil suatu keputusan atau dalam memecahkan suatu masalah tentu tidak dapat mengambil keputusan secara sepihak, terlebih lagi dalam hal pemerintahan. Alangkah lebih baiknya sebelum mengambil suatu keputusan harus melakukan musyawarah terlebih dahulu, karena dengan musyawarah memungkinkan munculnya varian pendapat baru tentang masalah yang didiskusikan dan memberi kesempatan untuk melihat urusan tersebut dari berbagai sudut pandang sesuai dengan perbedaan dari sudut pandang seseorang, tingkat pemikiran, serta latar belakang pengalaman dan sebagainya.

Musyawarah merupakan inti ajaran ketuhanan atau tradisi kenabian atau sunnah nabi. Oleh karena itu musyawarah hendaknya di budayakan dalam berbagai segmen kehidupan dan tentunya dalam berbagai lapisan sosial baik dalam kultur kebangsaan, kerakyatan, kekeluargaan maupun dalam suatu kelembagaan. Adapun mengenai konsep bagaimana seharusnya musyawarah tersebut dilakukan Rasulullah tidak memberikan pedoman yang khusus, hal ini mungkin merupakan isyarat dari Rasulullah untuk melaksanakan suatu musyawarah sesuai dengan tuntutan zaman yang tentunya selalu berubah-ubah. Sehingga sistem, cara dan metode musyawarah tersebut akan bersifat variatif, fleksibel, dan adaptif.

Salah satu praktek musyawarah yang dilaksanakan Rasulullah Saw. Dalam konteks politik pemerintahan yang cukup menarik untuk di cermati adalah musyawarah dalam rangka membuat kesepakatan damai antara kaum muslimin dan kaum Quraisy yang disebut perjanjian Hudaibiyah (7 H/ 629 M). Naskah perjanjian tersebut ditulis oleh Ali Bin Abi Thalib. Sedangkan Abu Bakar dan Umar bin Khatab serta beberapa sahabat lainnya merupakan wakil dari kaum muslimin. Adapun wakil dari kaum Quraisy adalah Suhail bin Amr. Dalam kitab *Tarik al-Umam wa al-Mulk* dijelaskan lebih detail bahwa dalam naskah perjanjian tersebut, terdapat dua kalimat yang mengalami perubahan, *pertama*, kalimat

:”Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang”. Suhail bin Amr, utusan dari Makkah non muslim keberatan dan meminta diganti dengan kalimat :”Dengan nama-Mu ya Tuhan”. Nabipun mengiyakan. *Kedua*, kalimat :”ini adalah naskah perjanjian Muhammad utusan Allah bersama Suhail bin Amr”. Suhail sebagai orang yang tidak mempercayai kerasulan Muhammad meminta agar diganti dengan kalimat :”ini adalah naskah perjanjian Muhammad bin Abdullah bersama Suhail bin Amr”. Nabipun mengikutinya kembali. Para peserta musyawarah utusan kaum muslimin sangat marah kepada Suhail bin Amr karena Nabi mengikuti keinginannya.<sup>24</sup>

Kepala desa pada dasarnya bertanggungjawab kepada rakyat desa dan prosedur pertanggungjawabannya disampaikan kepada bupati/walikota melalui camat. Kepala desa dan badan permusyawaratan desa wajib memberikan laporan pertanggungjawaban terhadap rakyat, dan juga memberi peluang terhadap masyarakat melalui badan permusyawaratan daerah desa untuk menanyakan atau meminta keterangan lebih lanjut terhadap laporan pertanggungjawaban yang di ajukan. Adapun Tugas dan Kewajiban kepala Desa antara lain :

1. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa;
2. Membina kehidupan masyarakat desa;
3. Membina perekonomian desa;
4. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
5. Mendamaikan perselisihan masyarakat desa, untuk mendamaikan perselisihan masyarakat di desa, kepala desa dapat dibantu oleh lembaga adat desa;
6. Mewakili desanya didalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukumnya.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Syamzan Syukur, *Petunjuk Rasulullah Mengenai Musyawarah Dalam Presfektif Sejarah*, Jurnal Farabi Vol. 10 No. 2, Desember 2013, hal. 141.

<sup>25</sup> C.S.T Kansil & Christine S.T Kansil, *Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 115



Berkaitan dengan kepemimpinan desa, dalam buku kepemimpinan desa membagi 3 (tiga) tipe kepemimpinan kepala desa, yakni kepemimpinan *Regresif*, kepemimpinan *Konservatif-Involutif*, dan kepemimpinan *Inovatif-Progresif*.

Kepemimpinan *Regresif*, dapat dimaknai sebagai kepemimpinan yang berwatak otokratis, secara teori otokrasi berarti pemerintahan yang kekuasaan politiknya dipegang oleh satu orang. Salah satu cirinya adalah antiperubahan, terkait dengan perubahan tata kelola baru tentang desa baik itu Musyawarah Desa, usaha ekonomi bersama desa dan lain-lain sudah pasti akan ditolak. Desa yang parokhial (hidup bersama berdasarkan garis kekerabatan, agama, etnis atau yang lain) serta desa-desa korporatis (tunduk pada kebijakan dan regulasi negara) biasanya melahirkan kepemimpinan seperti ini.<sup>26</sup>

Kepemimpinan *Konservatif-Involutif*, merupakan model kepemimpinan yang ditandai dengan hadirnya kepala desa yang bekerja apa adanya (taken for granted), menikmati kekuasaan dan kekayaan, serta tidak berupaya melakukan inovasi (perubahan) yang mengarah pada demokratisasi dan kesejahteraan rakyat. Kepemimpinan tipe ini pada umumnya hanya melaksanakan arahan dari atas, melaksanakan fungsi kepala desa secara tekstual sesuai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) kepala desa.

Kepemimpinan *Inovatif-Progresif*, kepemimpinan tipe ini di tandai dengan adanya kesadaran baru mengelola kekuasaan untuk kepentingan masyarakat banyak. Model kepemimpinan ini tidak anti terhadap perubahan, membuka seluas-luasnya ruang partisipasi masyarakat, transparan serta akuntabel. Dengan pola kepemimpinan yang demikian kepala desa tersebut justru akan mendapatkan legitimasi yang lebih besar dari masyarakat.<sup>27</sup>

Melihat dari ketiga tipe kepemimpinan kepala desa di atas dapat kita simpulkan bahwa tipe yang sangat tepat untuk diterapkan dalam kerangka pembaharuan desa serta

---

<sup>27</sup> Muhammad Zaini Mustakim, *Kepemimpinan Desa*, Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, Jakarta Pusat hal. 11-12

implementasi UU Desa adalah tipe nomor 3 (tiga) yaitu kepemimpinan *Inovatif-Progresif*. Dikarenakan tipe ini merupakan tipe pemimpin yang tidak anti terhadap perubahan serta membuka seluas-luasnya ruang untuk masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam pembangunan dan kesejahteraan desa, sehingga dalam mengelola kekuasaannya tidak mengenyampingkan kepentingan masyarakatnya.

### **1. Pemilihan Kepala Desa**

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, kata pemilihan berasal dari kata dasar pilih yang artinya “dengan teliti memilih, tidak dengan sembarangan saja, mengambil mana-mana yang disukai, mencari atau mengasingkan mana-mana yang baik, menunjuk orang, calon.”<sup>28</sup> Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa kata pemilihan umum (pemilu) adalah memilih dengan cermat dan teliti yang dilakukan secara umum atau dengan hati nurani seorang wakil yang dapat memegang teguh dan membawa amanah yang diberikan dan dapat menjalankan apa-apa yang menjadi kehendak pemilih yang diamanahkan oleh seorang yang terpilih. Menurut Ali Moertopo, pemilihan umum adalah sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya dan merupakan lembaga demokrasi.<sup>29</sup>

Pemilihan kepala desa atau biasa disebut pilkades adalah suatu pemilihan kepala desa untuk mencari seorang pemimpin terbaik yang nantinya akan mempunyai kekuasaan serta wewenang untuk mengendalikan pembangunan desa selama beliau terpilih dan menjabat sebagai kepala desa yang mengedepankan kepentingan umum dan kesejahteraan masyarakat desa yang dilakukan secara langsung, umum dan rahasia oleh warga setempat.

---

<sup>28</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, hal.683

<sup>29</sup> Ali Moertopo, *Strategi Pembangunan Nasional*, CSIS, hal. 179

Bagi Indonesia yang telah menetapkan dirinya sebagai negara demokrasi, pemilu adalah keniscayaan. Dalam pemilu, aspirasi rakyat dimungkinkan dapat berjalan dengan baik. Pada pemilu pula, rakyat pemilih akan bisa menilai para calon pemilu yang dapat menawarkan visi, misi serta program kandidat, sehingga mereka tahu akan kemana arah penajalan negaranya. Pemilihan umum pula, dianggap merupakan tahap paling awal dari berbagai rangkaian kehidupan ketatanegaraan yang demokratis, sehingga pemilu merupakan motor penggerak mekanisme sistem politik demokrasi.

Berbeda dengan pejabat-pejabat yang lain seperti lurah yang merupakan pegawai negeri sipil, kepala desa merupakan jabatan yang dapat di duduki oleh warga biasa. Pilkades dilakukan dengan cara mencoblos atau memilih calon kepala desa. Pilkades tentunya merupakan suatu bentuk kegiatan politik yang menarik bagi masyarakat desa, akan tetapi tidak sedikit pula dari masyarakat desa yang tidak peduli akan hal itu. Ketidakpedulian masyarakat ini justru dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu untuk meraih jabatan dan mendapatkan kekayaan dengan memanfaatkan kekuasaan politik.

Adapun orang yang dipilih menjadi kepala desa adalah penduduk desa warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di desa tersebut dan memenuhi syarat-syarat untuk dipilih. Kepala desa dipilih langsung oleh masyarakat desa yang telah memenuhi syarat dan bagi calon kepala desa yang terpilih dengan mendapat suara terbanyak ditetapkan oleh Badan Perwakilan Desa dan di sahkan oleh bupati dengan masa jabatan sepuluh tahun atau dua kali masa jabatan terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Adapun syarat-syarat untuk menjadi kepala desa sesuai dengan perundang-undangan antara lain :

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945

- c. Tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, G-30-S/PKI dan/atau kegiatan organisasi terlarang lainnya;
- d. Berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau berpengetahuan yang sederajat;
- e. Berumur sekurang-kurangnya 25 tahun;
- f. Sehat jasmani dan rohani;
- g. Nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya;
- h. Berkelakuan baik, jujur, dan adil;
- i. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana;
- j. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di daerah setempat;
- l. Bersedia dicalonkan menjadi kepala daerah; dan
- m. Memenuhi syarat lain yang sesuai dengan adat istiadat yang diatur dalam peraturan Daerah.<sup>30</sup>

Pilkades ini tentunya terasa lebih spesifik dari pada pemilu-pemilu di atasnya. Dengan adanya kedekatan serta keterkaitan secara langsung antara pemilih dan para calon, membuat suhu politik di lokasi seringkali lebih terasa dari pada saat pemilu-pemilu yang lain. Pengenalan serta sosialisasi terhadap bakal calon-calon kepala desa bukan lagi hal yang mutlak harus dilakukan. Para bakal calon biasanya sudah banyak di kenal oleh setiap anggota masyarakat yang akan memilih. Sehingga, sosialisasi program atau visi misi seringkali tidak dijadikan sebagai suatu media kampanye atau pendidikan politik

---

<sup>30</sup> C.S.T Kansil & Christine S.T Kansil, *Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 113-114

yang baik. Kedekatan pribadi tentunya seringkali banyak dipakain oleh masyarakat untuk menentukan pilihannya masing-masing.

## 2. Pemberhentian Kepala Desa

Pemberhentian kepala desa pada dasarnya terdiri dari dua jenis, yaitu pemberhentian sementara dan pemberhentian permanen. Sebelum adanya pemeberhentian kepala dsea secara permanen ada beberapa tahan yang harus dilaksnakan. Yaitu pelaporan, pemeriksaan khusus serta proses hukum yang lebing tinggi seperti persidangan. Kepala desa yang di berhentikan sementara atau permanen harus di sahkan melalui keputusan bupati/walikota. Pemberhentian ini dilakukan atas usulan Badan Permusyawaratan Daerah kepada Bupati/Walikota melalui camat yang kemudian di buatkan Surat Keputusan oleh Bupati/Walikota setelah di periksa dan dinyatakan pantas untuk di berhentikan.

Seorang kepala desa berhenti dari masa jabatannya dikarenakan beberapa alasan seperti meninggal dunia, permintaan sendiri, atau karena diberhentikan. Kepala desa dapat diberhentikan karena beberapa faktor antara lain :

- a. Masa jabatannya telah berakhir;
- b. Sudah tidak mampu melaksanakan tugasnya secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) tahun;
- c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala desa;
- d. Dinyatakan telah melanggar syarat sebagai kepala desa;
- e. Tidak menjalankan kewajibannya sebagai kepala desa;
- f. Melakukan larangan bagi kepala desa.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> H. A. Tabrani Rusyam, *Membangun Efektifitas Kinerja Kepala Desa*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm 8.

Pemberhentian Kepala Desa ini tidak serta merta dilakukan secara sembarangan dan arogan oleh Bupati/WaliKota, karena telah ada aturannya. Bupati/waliKota dapat melakukan pemberhentian sementara kepala desa karena :

- a. Tidak melaksanakan kewajibannya sebagai kepala desa;
- b. Melanggar larangan sebagai kepala desa;
- c. Dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan; dan
- d. Ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, teroris, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.<sup>32</sup>

Apabila kepala desa berhenti sesuai dengan uraian di atas maka badan permusyawaratan desa melaporkan kepada bupati/walikota melalui camat bahwa kepala desa berhenti, dimana laporan tersebut memuat materi kasus yang dialami kepala desa yang bersangkutan dan kemudian bupati/walikota melakukan kajian untuk proses selanjutnya atas laporan tersebut.

Dalam hal penyelidikan, penyidik tidak serta merta melakukan penyidikan kepada kepala desa yang bersangkutan. Tindakan penyidikan terlebih dahulu harus di sampaikan oleh atasan penyidik kepada bupati paling lama 3 (tiga) hari dan di laksanakan setelah mendapat persetujuan tertulis dari bupati yang dimana dalam hal ini mengecualikan dua hal a; tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan, dan b; diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati.<sup>33</sup> Kedua hal tersebut penyidik dapat langsung melakukan tindakan tanpa adanya persetujuan dari bupati.

---

<sup>32</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 66 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala desa.

<sup>33</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan selayar No. 4 tahun 2009 Tentang Tata Cara Pemilihan Dan Pemberhentian Kepala Desa.

Maka di lihat dari uraian di atas, tentunya pemberhentian kepala desa bukan suatu hal yan serta merta di lakukan begitu saja secara sembarangn dan arogan oleh bupati/walikota, akan tetapi terdapat beberapa alasan serta proses sebelum pemberhentian kepala desa itu secara sah di berhentikan dan ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota yang kemudian di sampaikan kepada kepala desa yang bersangkutan dan para pejabat terkait pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

#### **D. Pengertian Korupsi**

Tindak pidana korupsi yang dalam bahasa inggris di sebut dengan *criminal acts of corruption* yang terdiri dari atas dua suku kata, yang meliputi :

1. Tindak Pidana; dan
2. Korupsi

Tindak pidana korupsi dapat dianalisis dari pengertian yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan maupun pandangan ahli. Pengertian tersebut sebagai berikut :

1. Pasal 1 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi Yang menyatakan Bahwa:

” Dihukum kerana tindak pidana korupsi ialah:

- a. Barang siapa yang dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau dengan orang lain, atau suatu badan, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara, atau diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
- b. Barang siapa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan, menyalagunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”.

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menjelaskan :

”Setiap orang yang dikategorikan melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri, menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan ataupun sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan negara atau perekonomian negara”<sup>34</sup>

Tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang banyak dilakukan oleh pejabat-pejabat negara saat ini. Tindak pidana ini tidak hanya dilakukan oleh kalangan pemerintahan eksekutif, tetapi tindak pidana ini juga dilakukan oleh oknum-oknum yang berada di lembaga legislatif, yudikatif serta pejabat pada lembaga-lembaga swasta lainnya. Begitu banyak pejabat-pejabat pemerintahan yang melakukan tindak pidana ini hanya karena ingin menguntungkan diri sendiri tanpa memikirkan masyarakat yang berada di bawahnya. Korupsi merupakan bentuk penyimpangan perilaku pejabat publik terhadap urusan-urusan publik yang melanggar aturan pada sebuah institusi publik. Pada umumnya seseorang telah dianggap korupsi apabila menerima hadiah dari seseorang yang bertujuan untuk mempengaruhi pejabat yang berkuasa agar mengambil keputusan yang dapat menguntungkan dirinya dan menguntungkan orang yang memberi hadiah. Akan tetapi, undang-undang telah jelas bahwa yang dimaksud tindak pidana korupsi tak hanya yang menguntungkan diri sendiri akan tetapi suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, memperkaya diri dengan perbuatan curang yang dapat merugikan keuangan dan perekonomian negara merupakan tindak pidana korupsi.

---

<sup>34</sup> Hj. Rodliyah dan H. Salim HS, *Hukum Pidana Khusus*, PT RajaGrafindo Persada, Depok, Hlm 23-24



### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### ***A. Jenis dan Lokasi Penelitian***

###### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian pada skripsi ini adalah penelitian Yuridis-Empiris dengan kata lain adalah penelitian hukum sosiologis dan dapat pula disebut dengan penelitian lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat.<sup>35</sup>

###### **2. Lokasi Penelitian**

Dalam hal ini penulis akan melakukan penelitian di kabupaten Kepulauan selayar karena dianggap cocok untuk menjawab permasalahan yang penulis ajukan pada rumusan masalah sebelumnya. Penelitian akan berfokus pada kantor Inspektorat Daerah yang merupakan lembaga daerah yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan, serta Bapendes yang merupakan lembaga Penyelenggaraan Pemerintahan desa.

##### ***B. Pendekatan Penelitian***

Pendekatan penelitian yang di gunakan adalah pendekatan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan ialah pendekatan yang di gunakan untuk mengkaji serta menganalisis segala ketentuan-ketentuan hukum, sumber-sumber hukum, asas-asas hukum serta sistematika hukum.

##### ***C. Sumber Data***

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut :

---

<sup>35</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta, Sinar grafika, 2002), hlm. 15.

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh dengan mengadakan wawancara secara langsung kepada narasumber yang dianggap berpotensi dalam memberikan informasi yang relevan dan yang sebenarnya dilapangan.
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari perpustakaan yaitu penelaan literatur-literatur, jurnal, karya ilmiah, dan dokumen-dokumen yang berkaitan langsung dengan masalah yang akan di bahas.<sup>36</sup>

#### ***D. Metode Pengumpulan Data***

Adapun metode pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis adalah dengan cara melakukan wawancara atau tanya jawab terhadap H, Ar, Krg. Magassing, S.H., M.H selaku Inspektur pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar yang dianggap mampu memberikan informasi terkait masalah yang akan di bahas atau di sebut dengan data primer. Dan adapun yang kedua adalah dengan penelaan terhadap literatur-literatur, jurnal, karya ilmiah dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas oleh penulis.

#### ***E. Instrumen Penelitian***

Instrumen penelitian yaitu menjelaskan tentang alat pengumpulan data yang sesuai dengan jenis penelitian yang dilakukan dengan merujuk pada metodologi penelitian.<sup>37</sup> Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara yang dijadikan dasar untuk mendapatkan informasi dari narasumber yang bersangkutan serta Handphone yang bertujuan untuk melakukan dokumentasi terhadap proses wawancara antara peneliti dengan narasumber.

---

<sup>36</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamadji, *Penelitian Hukum Normatif, suatu tinjauan singkat*( Jakarta, Grafindo Persada, 2011 ), hlm 12.

<sup>37</sup> Muldjono Damopoli, *Pedoman Penulisan Karya tulis Ilmiah, Makala, Skripsi, Tesis, Disertasi, dan laporan Penelitian* ( Makassar, Alauddin Press, 2013 ), Hlm 17.

#### ***F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data***

Data yang diperoleh dan dikumpulkan baik dalam bentuk data primer maupun sekunder kemudian disusun dan dianalisis secara kualitatif dan selanjutnya di uraikan secara deskriptif. Hal ini dilakukan guna untuk memperoleh gambaran yang dapat dipahami secara jelas untuk menghindari kesalahan dalam melakukan penelitian dan mampu memperoleh kemudahan pemahaman.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### 1. Kondisi Geografis

Secara geografis Kabupaten Kepulauan Selayar adalah salah satu kabupaten yang berada di Sulawesi Selatan yang bergugus kepulauan. Dengan seluruh wilayah terpisah dengan daratan Sulawesi, Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki garis pantai kurang lebih 670 Km.

Jumlah pulau yang berada di Kabupaten Kepulauan Selayar sekitar 130 buah, dari jumlah tersebut ada sekitar 33 buah pulau yang berpenghuni dan sisanya tidak berpenghuni. Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar berada pada ketinggian di atas permukaan laut antara 0 – 500 m. Tingkat ketinggian daratan di daerah Kabupaten Kepulauan Selayar ini didominasi oleh dataran yang rendah dengan ketinggian antara 0 – 25 m di atas permukaan laut. Kabupaten Kepulauan Selayar berada pada titik koordinat :  $5^{\circ} 42'$  –  $7^{\circ} 35'$  Lintang Selatan dan  $120^{\circ} 15'$  –  $122^{\circ} 30'$  Bujur Timur dengan batas wilayah sebagai berikut<sup>38</sup> :

- a. Sebelah utara berbatasan dengan kabupaten Bulukumba;
- b. Sebelah timur berbatasan dengan laut Flores;
- c. Sebelah selatan berbatasan dengan laut Flores dan Selat Makassar;
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Secara administrasi wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar terbagi menjadi 11 (sebelas) kecamatan dengan perincian 6 (enam) Kecamatan di wilayah Daratan Pulau Selayar dan 5 (lima) Kecamatan yang berada di wilayah Kepulauan. Dari 11 (sebelas) kecamatan tersebut kemudian dibagi menjadi 73 wilayah desa/kelurahan

---

<sup>38</sup> Badan Pusat Statistik, *Selayar Dalam Angka* (Selayar:BPS,2018), h.6

dimana pusat pemerintahan berada di kota Benteng, Kecamatan Benteng dan berbatasan langsung dengan Kecamatan Bontoharu sebagai kecamatan tempat peneliti melakukan penelitian. Dengan perincian berada di desa Bontosunggu Kecamatan Bontoharu, dengan jarak dari pusat kota kurang lebih 5 (lima) kilo.

## 2. Luas Wilayah

Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki luas wilayah 10.503,69 Km<sup>2</sup> yang terdiri dari luas wilayah laut kurang lebih 9.146,66 Km<sup>2</sup> (87,08%) sedangkan luas wilayah daratannya sekitar 1.357,03 Km<sup>2</sup> (12,92%). Dengan perincian sebagai berikut :

**Tabel 1.**

**Luas Wilayah dan Persentase Terhadap Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Selayar**

No.	Kecamatan	Luas (Km <sup>2</sup> )	Persentase(%)
1	asimarannu	195,33	14,39
2	asilambena	114,88	8,47
3	asimasunggu	131,8	9,71
4	akabonerate	49,3	3,63
5	asimasunggu Timur	67,14	4,95
6	ontosikuyu	248,22	18,29
7	ontoharu	128,12	9,44
8	enteng	24,63	1,81
9	ontomanai	136,42	10,05
10	uki	68,14	5,02
11	ontomatene	193,05	14,23
	<b>Kabupaten Kepulauan Selayar</b>	<b>1357,03</b>	<b>100,00</b>

Sumber Data: BPS Kabupaten Kepulauan Selayar 2018

## 3. Visi dan Misi

Kebupaten Selayar adalah salah satu Kabupaten yang bergugus kepulauan yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan

Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822). Yang kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 berubah nama menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar.

Melalui suatu konsensus di bentuk dan ditetapkanlah visi kabupaten, sesuatu yang akan menjadi suatu pedoman dalam pengambilan suatu keputusan. Serta akan memberikan suatu inspirasi serta memberikan tantangan terhadap prestasi dimasa mendatang yang tentunya dengan tetap memperhatikan sistem nilai strategis yang berfungsi sebagai titik temu stakeholder serta memungkinkan adanya fleksibilitas dan kreatifitas dalam pelaksanaan.

Adapun visi yang menjadi visi Kabupaten kepulauan Selayar dirumuskan sebagai berikut : “ **Terwujudnya Masyarakat Maritim Yang Sejahtera Berbasis Nilai Keagamaan Dan Budaya**”.<sup>39</sup> Adapun rumusan misi untuk mewujudkannya adalah:

- a. Mewujudkan nilai keagamaan sebagai sumber inspirasi dan basis nilai nilai utama dalam pembangunan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan;
- b. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik melalui pendekatan aspiratif, partisipatif, dan transparan;
- c. Mewujudkan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat;
- d. Mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur dan peningkatan investasi swasta di sektor perikanan, kelautan, dan pariwisata;
- e. Mewujudkan pengelolaan potensi sumber daya alam sesuai keunggulan komparatif dan kompetitif daerah;

---

<sup>39</sup> <https://kepulauanelayarkab.go.id/hal-visi-misi.html> ( Diakses pada tanggal 7 Oktober pukul 13:11)

- f. Mewujudkan peningkatan produktifitas dan daya saing daerah serta pertumbuhan di sektor agrobisnis dan agromaritim yang berbasis pada ekonomi kerakyatan;
- g. Mewujudkan pelestarian tradisi dan kearifan lokal melalui strategi kebudayaan.

### ***B. Alasan Pemberhentian Kepala Desa***

Seorang pemimpin tentunya tidak boleh arogan ketika mendapat amanah dari masyarakat. Selain harus amanah, seorang pemimpin tidak boleh arogan dengan kekuasaan yang ia miliki. Seperti misalnya seorang Bupati/Walikota sebagai pemimpin pada tingkat Kabupaten/Kota ia harus bisa menghadirkan diri di tengah-tengah rakyatnya. Ketika seorang pemimpin jauh dari rakyatnya, maka ia tidak pernah mengetahui yang sesungguhnya akan kebutuhan masyarakatnya dan kondisi wilayahnya serta perselisihan yang terjadi di wilayahnya.

Dalam hal pemberhentian pejabat pemerintahan yang berada di bawah pimpinannya pun seorang pemimpin tidak boleh membuat keputusan secara sepihak atau secara arogan. Seperti misalnya dalam hal pemberhentian kepala desa sebagai pejabat pemerintahan yang berada di bawah pimpinan Bupati/Walikota. Seorang Bupati/Walikota tidak bisa secara arogan dalam melakukan pemberhentian kepala desa, harus ada alasan-alasan yang kuat sehingga seorang kepala desa dapat di berhentikan. Terkait dengan pemberhentian kepala desa telah di atur beberapa alasan pemberhentian kepala desa dalam Undang-Undang dan beberapa peraturan lainnya seperti Peraturan Pemerintah, peraturan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang tata cara pengangkatan dan pemberhentian kepala desa.

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam pemberhentian Kepala Desa yang dikarenakan meninggal dunia, permintaan sendiri, berakhir jabatan, dan diberhentikan

dimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah menyebutkan Bupati/Walikota berwenang untuk memberhentikan kepala desa yang melanggar dan mengangkat pegawai negeri sipil dari pemerintah daerah Kabupaten/Kota sebagai pejabat Kepala Desa (PJ) sebagai pengganti kekosongan Kepala Desa sampai terpilihnya Kepala Desa Baru.<sup>40</sup>

Berkaitan dengan pemberhentian dan pengangkatan PJ kepala desa di atas telah diatur dalam Undang-Undang Nomo 6 Tahun 2014 Pasal 40 sampai dengan 47 yang meliputi :

- a. Kepala desa berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri, atau di berhentikan karena berakhir masa jabatannya, tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap selama 6 bulan, tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon kepala desa, atau melanggar larangan. Pemberhentiannya di tetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota.ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian kepala desa juga di atur dalam peraturan pemerintah.
- b. Dalam hal sisa masa jabatan kepala desa yang di berhentikan tidak lebih dari 1 tahun, Bupati/Walikota mengangkat penjabat kepala desa dari PNS daerah, tetapi jika sisa jabatannya lebih dari satu tahun, Bupati/Walikota mengangkat penjabat (PJ) kepala desa yang menjbat sampai dengan ditetapkannya kepala desa antar waktu yang dipilih melalui musyawarah desa (Musdes).<sup>41</sup>

Pertumbuhan desa yang selama ini semakin meningkat tentunya tidak jauh kemungkinan akan menimbulkan permasalahan-permasalahan yang sangat perlu diperhatikan, yang dimana dampak dari permasalahan- permasalahan tersebut akan di

---

<sup>40</sup> Richa Rahmatin, "Dinamika Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Terkait Disfungsi Jabatan Kepala Desa ( Studi Kasus di Desa Bangunrejo Kabupaten Tuban)". Jurnal Hukum, Februari 2015, hal. 5

<sup>41</sup> R. Widodo Triputro, *Regulasi Desa*, Grup Penerbitan Cv Budi Utama, Yogyakarta, hal. 47-



rasakan langsung oleh masyarakat desa itu sendiri. Salah satu permasalahan yang perlu mendapat perhatian lebih dari pemerintahan daerah ialah mengenai pengelolaan dana desa yang tidak sesuai dengan laporan pertanggungjawaban setiap akhir tahun dan di akhir masa jabatannya. Sehingga besar kemungkinan adanya penyalagunaan dana desa yang terjadi dalam sistem pemerintahan desa. Sehingga sering terjadi pemberhentian kepala desa yang mengakibatkan kekosongan jabatan dalam pemerintahan desa yang menjadi penghambat proses pembangunan desa tersebut. Dari hasil penelitian ada 2 (dua) alasan yang menjadi penyebab seringnya terjadi pemberhentian kepala desa di desa bontosunggu kecamatan bontoharu kabupaten kepulauan selayar terjadi.

### **1. Meninggal Dunia**

Beberapa alasan yang telah di atur oleh undang-undang dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pemberhentian kepala desa ialah meninggal dunia, permintaan sendiri dan atau karena diberhentikan. Sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, salah satu penyebabnya ialah karena meninggal dunia. Kepala desa yang meninggal dunia akan di berehentikan secara terhormat oleh pemerintah setempat melalui putusan Bupati/Walikota, dan pemerintah daerah menunjuk PJ kepala desa baru untuk mengisi kekosongan jabatan.

Berdasarkan penelitian penulis terhadap data yang di dapatkan, pemberhentian kepala desa yang meninggal dunia telah termuat dalam Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 443/IX/ tahun 2010 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Bontosunggu Kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar, Yaitu :

- a. Bahwa sehubungan dengan meninggalnya Kepala Desa Bontosunggu pada hari senin tanggal 23 Agustus 2010 maka perlu diberhentikan dari jabatannya.

- b. Bahwa saudara rosmiati sebagai sekretaris desa bontosunggu di pandang cakap dan memenuhi syarat untuk di tunjuk sebagai Pejabat Kepala Desa Bontosunggu Kecamatan Bontoharu.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Sehingga setelah memperhatikan surat keterangan kematian Nomor 012/ DLT/VIII/2010 tanggal 24 Agustus 2010 perihal meninggalnya Kepala Desa Bontosunggu Kecamatan Bontoharu. Maka Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar Memutuskan :

Menetapkan

KESATU : Memberhentikan dengan hormat saudara Baso Daeng dari jabatannya sebagai Kepala Desa Bontosunggu Kecamatan Bontoharu.

KEDUA : Menunjuk saudara Rosmiati ( sekretaris desa Bontosunggu) sebagai pejabat Kepala Desa Bontosunggu Kecamatan Bontoharu.

KETIGA : Memerintahkan kepada Pejabat Kepala Desa sebagaimana di maksud diktum Kedua untuk melaksanakan tugas Kepala Desa serta tugas lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkannya keputusan ini dibebani pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bontosunggu Kecamatan Bontoharu tahun Anggaran 2010.

KELIMA : Pada saat keputusan ini Mulai berlaku, Maka Keputusan Bupati Kepulauan Selayar nomor 658/ VIII/ Tahun 2007 tentang pemberhentian kepala desa dan pejabat kepala desa serta pengesahan

pengangkatan kepala desa terpilih Kabupaten Kepulauan Selayar Masa Bakti 2007-2013, Lampiran II nomor urut 4 atas nama Baso Daeng, di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**KEENAM** : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

**KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di lihat dari Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 443/IX/ tahun 2010 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Bontosunggu Kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar di atas bahwa meninggal dunia merupakan salah satu alasan pemberhentian kepala desa, sebagaimana yang telah termuat dalam undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya. Sehingga dalam hal pemberhentian kepala desa dengan alasan meninggal dunia di lihat dari putusan diatas harus melalui putusan Bupati/Walikota. Seorang kepala desa yang berhenti dengan alasan meninggal dunia harus pula di berhentikan dengan hormat melalui putusan Bupati/Walikota sebagaimana yang termuat dalam putusan di atas. Di samping itu, Bupati/Walikota juga mengangkat PNS daerah untuk menjadi PJ kepala desa yang baru untuk mengisi kekosongan jabatan dan melanjutkan visi dan misi kepala desa yang lama.

## **2. Penyalagunaan Anggaran Desa**

Alasan kedua yang menjadi penyebab sering terjadi pemberhentian kepala desa di Desa Bontosunggu Kecamatan Bontoharu kabupaten Kepulauan Selayar ialah mengenai Anggaran Desa. Penyalagunaan dana desa tentunya harus mendapat perhatian lebih dari

pemerintah karena dapat merugikan keuangan negara. Sehingga tidak menutup kemungkinan penyalagunaan dana desa tersebut menjadi alasan terbesar terhadap pemberhentian kepala desa yang dapat berujung pada sanksi pidana. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 juga mengatur mengenai pemberhentian kepala desa terhadap kepala desa yang menjadi tersangka dalam tindak pidana, yang berbunyi; Pemberhentian sementara dilakukan oleh Bupati/Walikota (dengan Keputusan Bupati/Walikota) jika kepala desa di tetapkan sebagai tersangka tindak pidana dengan ancaman hukuman penjara paling singkat 5 tahun, tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara. Atas pemberhentian sementara tersebut, sekretaris desa melaksanakan tugas dan kewajiban kepala desa sampai dengan adanya putusan pengadilan.<sup>42</sup>

Berdasarkan hasil penelitian penulis dari beberapa data yang telah di temukan salah satu penyebab yang perlu mendapat perhatian serius oleh pemerintah adalah berkaitan dengan penyalagunaan anggaran desa. Berdasarkan uraian hasil pemeriksaan terdapat beberapa jenis temuan yang perlu di tindak lanjuti. Dari data yang di temukan pelaksanaan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemsyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa oleh Kepala Desa Bontosunggu Kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar pada akhir tahun Anggaran 2016, belum membuat laporan/ memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa (LPPD) dan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) kepada Bupati Kepulauan Selayar.

Dari beberapa temuan inspekorat yang berkaitan dengan keuangan desa antara lain sebagai berikut ;

---

<sup>42</sup> R. Widodo Tripuro, *Regulasi Desa*, Grup Penerbitan Cv Budi Utama, Yogyakarta, hal. 47

## 1. Dana Desa

- a. Terdapat dana untuk kegiatan rabat beton yang tidak digunakan pada pekerjaan pembangunan jalan rabat beton dusun padang utara dan pembangunan jalan rabat beton di dusun padang selatan dengan nilai total sebanyak Rp. 248.440.194,- ( dua ratus empat puluh delapan juta empat ratus empat puluh ribu seratus sembilan puluh empat rupiah).
- b. Terdapat kekurangan volume fisik pada kegiatan bantuan yang akan diserahkan kepada masyarakat/kelompok masyarakat berupa kawat Duri dan bibit sapi dengan nilai total sebanyak Rp. 86.640.000,- ( delapan puluh enam juta enam ratus empat puluh ribu rupiah)
- c. Terdapat pengeluaran dana/pertanggungjawaban keuangan yang fiktif pada pembangunan Tanggul pengaman Banjir, karena bukti Fisik berupa dekorasi dan Dokumentasi tidak ada dengan nilai sebanyak Rp. 899.100,- ( delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus rupiah).
- d. Terdapat penyertaan modal desa berupa bantuan tenda terowongan untuk BUMDES sebanyak 8 petak dengan nilai total sebanyak Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) sedangkan Badan Usaha Milik Desa di Desa Bontosunggu belum terbentuk dan belum ditetapkan dengan Peraturan Desa.

## 2. Alokasi Dana Desa

- a. Terdapat Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2016 yang tidak dapat di pertanggungjawabkan oleh bendahara desa dengan nilai total Rp. 80.336.031,- (delapan puluh juta tiga ratus tiga puluh enam ribu tiga puluh satu rupiah).
- b. Terdapat kekurangan volume fisik pada Pekerjaan Pembangunan Pagar Kantor BPD dan Pemangunan Duiker dengan total nilai sebanyak Rp. 40.037.324,35 (

empat puluh juta tiga puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah koma tiga puluh lima sen ).

- c. Terdapat pengeluaran dana/pertanggungjawaban keuangan pada 19 (Sembilan Belas) kegiatan dengan nilai total sebanyak Rp. 13.320.000,- (tiga belas juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) yang tidak dikenakan pungutan pajak berupa Pajak Daerah sebanyak Rp. 1.332.000,- ( satu juta tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah).
- d. Terdapat pengeluaran dana/pertanggungjawaban keuangan pada 33 (tiga puluh tiga) jenis belanja dengan nilai total sebanyak Rp. 70. 838.792,- ( tujuh puluh juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah ) yang tidak di kenakan pungutan pajak berupa PPN dengan nilai sebanyak Rp. 2.730.909,- dua jutha tujuh ratus tiga puluh ribu sembilan ratus sembilan rupiah) PPh22 dengan nilai sebanyak Rp. 703.893,- tujuh ratus tiga ribu delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah) PPh23 dengan nilai sebanyak Rp. 532.800,- (lima ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus rupiah ) dan PPh21 dengan nilai sebanyak Rp. 234.000,- ( dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah).
- e. Terdapat pengeluaran dana/pertanggungjawaban keuangan pada 23 (dua puluh tiga) jenis kegiatan dengan nilai sebanyak Rp. 27.348.000,- ( dua puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah) yang tidak di dukung dengan bukti yang lengkap dan sah berupa rincian penggunaan dana, Undangan, Daftar Hadir, Notulen rapat, surat tugas, SPPD, Laporan perjalanan Dinas, Nota Pesanan, Berita Acara Serah Terima Barang, dan Kwitansi pembayaran.
- f. Biaya pada kegiatan Penyusunan LPJ dengan nilai sebanyak Rp. 735.000,- ( tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah) seharusnya tidak dianggarkan, karena

merupakan bagian dari tugas bendahara desa dan sekretaris desa selaku Koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa.

- g. Terdapat kekurangan volume fisik pengadaan pupuk pada kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat sebanyak 30 (tiga puluh) botol dengan nilai total sebanyak Rp. 2.250.000,- (dua juta dua Ratus lima puluh ribu rupiah) karena sesuai SPJ sebanyak 400 (empat ratus) botol dengan nilai sebanyak Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sedangkan sesuai daftar penerima hanya sebanyak 370 ( tiga ratus tujuh puluh) botol dengan nilai sebanyak Rp. 27.750.000,- ( dua puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- h. Terdapat pengeluaran dana /pertanggungjawaban keuangan yang fiktif pada 4 (empat) jenis belanja, karena bukti fisik tidak ada berupa Website Desaku Online, Dispenser, Sepeda Motor, Surat Tugas, dan SPPD dengan nilai total sebanyak Rp. 24.653.156,- ( dua puluh empat juta enam ratus lima puluh tiga ribu seratus lima puluh enam rupiah).

Melihat dari hasil temuan inspektorat yang bermula dari laporan Ketua BPD Desa Bontosunggu Nomor : 01 / BPD-DL/ IV / 2017 perihal Laporan Pelanggaran Kepala Desa Bontosunggu kecamatan Bontoharu Kabupaten kepulauan selayar. Maka Bupati Kepulauan Selayar mengeluarkan surat keputusan dengan Nomor : 357 / V / Tahun 2017 Tentang Pemberhentian Kepala Desa Bontosunggu Serta Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Bontosunggu Kecamatan Bontoharu Kabupaten kepulauan Selayar.

Menimbang : a. Bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Desa perlu mengedepankan prinsip prinsip demokrasi dengan dukungan dan tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi tanpa mengabaikan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- b. Bahwa saudara Muh. Arsyad Kadir Kepala Desa Bontosunggu dianggap tidak mampu menjalankan roda pemerintahan, pembangunan dan tugas kemasyarakatan, sehingga dipandang perlu diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan keputusan bupati;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan tidak dengan hormat saudara Muh. Arsyad Kadir dari jabatannya sebagai Kepala Desa Bontosunggu Kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar.

KEDUA : Mengangkat saudara Abdul Aziz, S.Sos. (Kasi Pemerintahan Kecamatan Bontoharu) Sebagai Pejabat Kepala Desa Bontosunggu Kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar.

KETIGA : Segala yang timbul sehubungan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bontosunggu Kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2017.

KEEMPAT : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 685 / VIII / Tahun 2013 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pejabat Kepala Desa Terpilih Kabupaten Kepulauan Selayar Masa Bhakti 2013-2019, Lampiran II atas nama Muh. Arsyad Kadir, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



KELIMA : Keputusan ini masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dilihat dari data di atas ada dua yang menjadi alasan terjadinya pemberhentian kepala desa di Desa Bontosunggu Kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar. Yaitu dengan alasan meninggal dunia yang di berhentikan secara terhormat mengingat kematian yang tak bisa di tentukan, dan yang kedua ialah penyalagunaan dana desa yang dimana setiap pembangunan yang dilakukan desa kadang tidak sesuai dengan volume fisik pembangunan serta anggaran belanja yang fiktif dan LPJ kegiatan yang tidak semestinya mendapat anggaran.

Dari dua alasan di atas tentunya yang wajib mendapat perhatian lebih dari pemerintah ialah pemberhentian kepala desa akibat penyalagunaan anggaran desa karena anggaran desa merupakan aset desa yang dapat merugikan negara apabila hanya di gunakan oleh segelintir orang yang tidak bertanggungjawab demi kepentingannya sendiri. Dengan pengelolaan nilai keungan yang berjumlah besar dan kewenangan serta kekuasaan yang diberikan kepada pemerintahan desa yang kurang *capable*, akan berpotensi dalam penyalagunaan anggaran akibat keterbatasan pengetahuan dan kemampuan pemerintah desa dalam mengelola anggaran desa. Dari keterbatasan akan pengetahuan dan kemampuan pemerintahan desa yang tidak dapat mengelola anggaran desa dengan baik berakibat pada tidak tercapainya kesejahteraan yang luas bagi masyarakat desa. Hal ini juga dapat berakibat pada praktik maladministratif baik itu di sadari atau tidak di sadari oleh para pemerintah desa dan jajarannya yang berujung pada nilai anggaran desa yang

besar namun tidak memberikan dampak signifikan terhadap perkembangan dan kemajuan desanya secara ironis berpeluang sebaliknya, yaitu memberikan dampak yang dapat menguntungkan segelintir orang dalam tata kelola pemerintahan desa tersebut.<sup>43</sup>

### **C. Prosedur Pelaksanaan Pemberhentian Kepala Desa**

#### **1. BPD ( Badan Permusyawaratan Desa)**

Sebagai perwujudan demokrasi, dalam penyelenggaraan pemerintahan desa telah dibentuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau dengan sebutan lain yang sesuai dengan budaya yang ada dan berkembang di desa yang bersangkutan. Yang berfungsi sebagai lembaga pengaturan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, seperti halnya dalam pembuatan dan pelaksanaan peraturan-peraturan desa, anggaran pendapatan dan belanja desa, dan keputusan kepala desa.

Tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD), di dalam penjelasannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 disebutkan bahwa BPD berfungsi untuk menetapkan Peraturan Desa (Perdes) bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Keanggotaan BPD terdiri dari wakil-wakil dari penduduk desa yang bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. BPD dipimpin dari dan oleh anggota. Masa jabatan ketua BPD adalah 6 tahun dan dapat di pilih 1 kali masa jabatan berikutnya. Syarat dan tata cara penetapan anggota ketua/pimpinan BPD ini diatur dalam Peraturan daerah yang berpedoman pada peraturan pemerintah.

<sup>44</sup>

Selain Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa juga menjelaskan tentang Badan Permusyawaratan Desa beserta Tugas Dan Fungsinya. Menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun

---

<sup>43</sup> Bintaro Wardianto dkk, *Percikan Pemikiran Tata Kelola dan Pembangunan Desa*, Airlangga University Press, Surabaya, hal. 315

<sup>44</sup> Samadi, *geografi*, Yudhistira, makassar, hal. 106

2014 Tentang Desa ialah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau yang di sebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Adapun fungsi Badan Permusyawaratan Desa yaitu :

- a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa;
- c. Melakukan pengawasan Kinerja kepala Desa.<sup>45</sup>

Melihat dari fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada huruf c di kemukakan salah satu tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa ialah melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa. Sehingga adanya Badan Permusyawaratan Desa di desa tidak hanya menetapkan peraturan desa bersama kepala desa dan membantu atau sebagai perpanjangan mulut dari aspirasi masyarakat, melainkan melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa baik yang di lihat langsung ataupun dari kritikan masyarakat terhadap kinerja kepala desa yang mungkin kurang mampu menjalankan roda pemerintahan di desa.

Dari hasil wawancara terhadap narasumber, Badan Permusyawaratan Desa tidak hanya melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa, akan tetapi anggota Badan Permusyawaratan Desa juga dapat membuat laporan pemberhentian kepala Desa yang telah lalai dalam menjalankan tugas-tugasnya dan juga menyalagunakan kewenangan sebagai kepala desa dan atau kasus-kasus lainnya yang mampu merugikan aset-aset pemerintahan desa dan menghambat pembangunan demi tercapainya kesejahteraan desa. Terkait dengan proses pelaporan oleh Badan

---

<sup>45</sup> Yusran Isnaini, *memahami desa : Tinjauan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Pelaksanaannya*, Pradipta Pustaka Media, Yogyakarta, hal.75

Permasyarakatan Desa telah di atur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa pada Pasal 8 angka 3 ,4, dan 5. Yaitu; apabila kepala desa diberhentikan maka Badan Permasyarakatan Desa melaporkan kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain; laporan Badan Permasyarakatan Desa kepada Bupati/Walikota memuat materi situasi yang terjadi terhadap kepala desa yang bersangkutan; dan atas laporan Pimpinan Badan Permasyarakatan Desa kepada Bupati/walikota melakukan kajian untuk proses selanjutnya.

## **2. Inspektorat Daerah**

Inspektorat Daerah merupakan suatu lembaga yang berada dalam yang merupakan unsur pengawas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah provinsi, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/Kota. Inspektorat dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan program Pengawasan
- b. Perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan; dan
- c. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan.<sup>46</sup>

Dasar pengawasan yang dilakukan Inspektorat Daerah Provinsi adalah Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah. Dalam Pasal 1 angka 11 peraturan pemerintah menyebutkan bahwa unsur pengawasan

---

<sup>46</sup> Pasal 5 Angka 3, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah

daerah adalah badan pengawas yang selanjutnya disebut Inspektorat Provinsi, Inspektorat Kabupaten, dan Inspektorat Kota.<sup>47</sup>

Inspektorat itu sendiri di pimpin oleh seorang inspektur. Inspektur Insektorat Daerah Provinsi dalam melaksanakan Tugas dan fungsinya bertanggungjawab langsung kepada gubernur dan secara teknis administrasi mendapat pembinaan dari sekretaris daerah. Kemudian inspektur inspektorat daerah Kabupaten/Kota bertanggungjawab langsung kepada Bupati/Walikota dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari sekretaris daerah. Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat daerah Provinsi di berikan kepada Gubernur, sedangkan Pelaksanaan Pengawasan oleh Inpektorat Daerah Kabupaten/Kota diberikan kepada Bupati/Walikota.

Terkait dengan tugas Inspektorat daerah dalam melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan desa, telah di atur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Tata Cara pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan desa ini meliputi administrasi pemerintahan desa dan urusan pemerintahan. Dalam hal administarsi desa pelaksanaan pengawasan dilakukan terhadap kebijakan desa, kelembagaan desa, keuangan desa, serta kekayaan desa itu sendiri. Pelaksanaan pengawasan ini dilakukan oleh pejabat pengawas pemerintahan oleh inspektorat kabupaten/Kota yang di koordinasikan oleh inspektur Kabupaten/Kota.

Rencana pengawasan tahunan atas penyelenggaraan pemerintahan desa ini di susun dalam bentuk Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang tentunya

---

<sup>47</sup> Angger Singit Pramukti Dan Meylani Chahyaningsi, *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*, Media Pressindo, Yogyakarta, hal- 62.

berpedoman pada kebijakan pengawasan dan ditetapkan oleh keputusan Bupati/Walikota. PKPT ini meliputi : ruang lingkup; sasaran pemeriksaan; desa yang diperiksa; jadwal pelaksanaan pemeriksaan; jumlah tenaga; anggaran pemeriksaan; dan laporan hasil pemeriksaan yang terbitkan. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa oleh pejabat pengawas pemerintahan dilakukan melalui pemeriksaan, monitoring dan evaluasi yang kemudian di tuangkan dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan dan melaporkannya kepada Bupati/Walikota.

Dalam kaitannya terhadap Pemberhentian Kepala Desa, terkhusus kepada kepala desa yang berkasus seperti penyalagunaan dana desa, maka Inspektorat daerah melakukan pemeriksaan terhadap kepala desa yang bersangkutan. Pemeriksaan ini dilakukan atas keputusan bupati atas usulan ketua BPD melalui camat. Bupati/Walikota mengeluarkan keputusan untuk melakukan Pemeriksaan Khusus oleh kepala desa yang bersangkutan oleh inspektorat daerah. Pemeriksaan Khusus ini dilakukan untuk mengetahui apakah laporan BPD yang memuat pelanggaran-pelanggaran kepala desa ini betul adanya sehingga dapat di tindak lanjuti dan di proses hukum sesuai pelanggaran yang di buatnya. Hasil pemeriksaan oleh inspektorat daerah ini kemudian di tuangkan ke dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan di limpahkan kepada pihak yang berwenang apabila terbukti adanya pelanggaran yang dilakukan oleh kepala desa yang dapat merugikan negara sehingga dapat di proses hukum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.

Dalam proses pemeriksaan khusus oleh inspektorat berdasarkan hasil wawancara oleh inspektur Kabupaten Kepulauan Selayar bapak H, Ar, Krg. Magassing, S.H., M.H mengatakan bahwa belum dilakukan pemberhentian sementara oleh kepala desa yang bersangkutan, dikarenakan laporan BPD ini belum tentu benar adanya. Apabila laporan BPD yang memuat pelanggaran-pelanggaran kepala desa ini betul adanya

maka hasil pemeriksaan oleh Inspektorat akan di tuangkan ke dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan akan di laporkan kepada bupati untuk dilakukan pemberhentian sementara dan kasus kepala desa yang bersangkutan akan di limpahkan ke proses hukum selanjutnya.

Dalam hal pemeriksaan di Inspektorat Daerah, seorang kepala desa tidak serta merta menerima semua tuduhan yang di tuduhkan. Tentunya seorang kepala desa yang periksa melakukan perlawanan terhadap apa-apa yang di tuduhkan, seorang kepala desa tidak serta merta menerima segala tuduhan tersebut. Terlebih lagi dalam hal tindak pidana korupsi bukan hanya kepala desa tersebut yang terlibat didalamnya. Tentunya ada beberapa oknum yang memperlancar jalannya sehingga aksinya dapat ia lakukan dengan dengan mudah. Akan tetapi penulis di sini hanya terfokus kepada kepala desa tersebut sebagai penanggungjawab tertinggi dalam pemerintahan desa.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah termuat dalam Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa dikatakan bahwa kepala desa diberhentikan sementara apabila dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan berstatus tersangka melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara. Apabila setelah melalui putusan pengadilan dan telah terbukti melakukan tindak pidana yang di ancam penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka akan dilakukan pemberhentian tidak dengan hormat oleh bupati melalui keputusan bupati.

Di samping itu, apabila kepala desa yang di telah diberhentikan sementara tadi telah melalui proses peradilan dan terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka bupati/walikota harus merahabilitasi dan atau mengaktifkan kembali kepala desa yang bersangkutan paling lama 30 hari sejak di tetapkannya putusan pengadilan, dan menjabat kembali sebagai kepala desa sampai akhir masa jabatannya.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ALAUDDIN  
MAKASSAR



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### ***A. Kesimpulan***

Dari uraian yang telah di bahas di atas, dapatlah di ambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Yang menjadi alasan seringnya terjadi Pemberhentian Kepala Desa di Desa Bontosunggu Kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar adalah yang pertama meninggal dunia. Dikarenakan kematian yang datang tanpa bisa diduga-duga membuat salah satu faktor kekosongan jabatan dalam pemerintahan desa yang berakhir pada pemberhentian dan mengangkat penjabat kepala desa yang baru untuk mengisi kekosongan tersebut. Dan yang kedua adalah penyalagunaan dana desa, yang dimana melihat anggaran desa yang cukup banyak membuat beberapa orang tergiur untuk memanfaatkan setiap anggaran yang masuk ke desa untuk kepentingan dan keuntungan pribadi yang dapat berdampak negatif terhadap keuangan negara terutama desa.
2. Untuk mencapai efektivitas suatu Undang-Undang tentu memerlukan kesadaran dari pihak-pihak yang akan menjalankan setiap peraturan perundang-undangan tersebut. Seperti misalnya dalam hal pemberhentian kepala desa yang tentunya tidak dapat di berhentikan secara arogan, akan tetapi telah di atur dalam peraturan perundang-undangan dan beberapa peraturan lainnya seperti peraturan daerah, peraturan menteri dalam negeri dan peraturan-peraturan lainnya. Dalam peraturan perundang-undangan telah di jelaskan tata cara pemberhentian kepala desa mulai dari pelaporan sampai dengan pemeriksaan terhadap kepala desa yang bersangkutan sebelum di putusan untuk diberhentikan.

### ***B. Implikasi Penelitian***

1. Untuk menambah kegunaan keilmuan, disarankan kepada peneliti selanjutnya agar dapat melakukan kajian lebih jauh berupa penelitian lanjutan terhadap efektivitas undang-undang desa serta peraturannya lainnya seperti peraturan daerah, agar dapat mengetahui efektivitas suatu peraturan dan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang lebih baik bagi perkembangan kajian ilmu pemerintahan.
2. Agar tidak lagi terjadi penyalagunaan dana desa serta penyalagunaan wewenang dalam pemerintahan desa alangkah baiknya pemerintah daerah melakukan sosialisasi tentang pengelolaan dana desa sehingga dari sosialisasi ini diharapkan kepala desa beserta jajaranya mampu mengelola dengan baik dana desa untuk perkembangan desa yang di pimpinnya, serta meningkatkan kualitas serta kuantitas SDM pelaksana kebijakan berdasarkan pada keahlian sesuai dengan yang butuhkan dalam pemerintahan desa.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

Angger Singit Pramukti, Dan Meylani Chahyaningsi, *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*, (Yogyakarta: Media Pressindo)

Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta, Sinar grafika, 2002).

Bintaro Wardianto dkk, *Percikan Pemikiran Tata Kelola dan Pembangunan Desa*, (Surabaya: Airlangga University Press)

C.S.T Kansil & Christine S.T Kansil, *Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ( Jakarta, Balai Pustaka)

H. A. Tabrani Rusyam, *Membangun Efektifitas Kinerja Kepala Desa*, (Jakarta: Bumi Aksara).

Hj. Rodliyah dan H. Salim HS, *Hukum Pidana Khusus*, ( Depok: PT RajaGrafindo Persada).

Muhammad Zaini Mustakim, *Kepemimpinan Desa*, Kementrian Desa, (Jakarta Pusat: Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia)

Muldjono Damopoli, *Pedoman Penulisan Karya tulis Ilmiah, Makalah, Skripsi, Tesis, Disertasi, dan laporan Penelitian* ( Makassar, Alauddin Press, 2013 ).

Peter Salim dan Yani Salam, *kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer* (Ed. 1, Jakarta: Modern English Press, 1991).

Petrus Soerjowinoto, *Ilmu Hukum, suatu pengantar buku panduan mahasiswa*, (Surabaya: CV. Garuda Mas Sejahtera, 2018) .

R. Widodo Triputro, *Regulasi Desa*, (Yogyakarta: Grup Penerbitan Cv Budi Utama)

Risma Handayani, *Pembangunan Masyarakat Pedesaan*, (Makassar: Alauddin University Press).

Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika).

Soerjono Soekanto dan Sri Mamadji, *Penelitian Hukum Normatif, suatu tinjauan singkat* (Jakarta: Grafindo Persada, 2011 ).

Samadi, *geografi*, (Makassar: Yudhistira)

Titik Triwlan, *Restorasi Hukum Tata Negara Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, (Depok: Prenadamedia)

Yusran Isnaini, *memahami desa : Tinjauan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Pelaksanaannya*, ( Yogyakarta: Pradipta Pustaka Media)

**Sumber Lain :**

Heri Okvianto, “*Koordinasi Peraturan Desa Cilempuyang Nomor 03 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa di Desa Cilempuyang Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap Tahun 2012*”. Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintah. Vol 3, No 1, (2017)

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 66 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala desa.

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan selayar No. 4 tahun 2009 Tentang Tata Cara Pemilihan Dan Pemberhentian Kepala Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah

Rafiah Rusyda, *Syarat-syarat Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa di Desa Banjararum, Kecamatan Kalibawang, Kabupaten Kulonprogo, Daerah Istimewah Yogyakarta*,”*Skripsi* ( Yogyakarta : Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga , 2013).

Richa Rahmatin,”*Dinamika Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Terkait Disfungsi Jabatan Kepala Desa ( Studi Kasus di Desa Bangunrejo Kabupaten Tuban)*”. Jurnal Hukum, (Februari 2015)

Syamzan Syukur, “*Petunjuk Rasulullah Mengenai Musyawarah Dalam Presfektif Sejarah*”, Jurnal Farabi Vol. 10 No. 2, (Desember 2013)

Tri Nurmalasari, *“Dampak Pergantian Kepala Desa Sebelum Habis Masa Jabatannya Terhadap Pelaksanaan Kewenangan Desa,” Skripsi* ( Yogyakarta : Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa, 2019 ).

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.


**Website :**

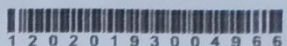
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar. “Selayang Pandang Selayar”, official website

1. <http://www.kepulauanselayarkab.go.id/hal-sejarah.html> (diakses pada tanggal 14 Februari 2020, Pukul 23:35 wita)

<https://kepulauan-selayarkab.go.id/hal-visi-misi.html> ( Diakses pada tanggal 7 Oktober pukul 13:11 wita)

## LAMPIRAN



  
1 2 0 2 0 1 9 3 0 0 4 9 6 6

**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN**

Nomor : 4645/S.01/PTSP/2020  
Lampiran :  
Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth.  
Bupati Kep. Selayar

di-  
**Tempat**

Berdasarkan surat Dekan Fak. Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar Nomor : B-2451/SH.0.1/PP.00.9/08/2020 tanggal 10 Agustus 2020 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a  
Nomor Pokok  
Program Studi  
Pekerjaan/Lembaga  
Alamat

: **NURUL MUAMMAR**  
: 10400116007  
: Ilmu Hukum  
: Mahasiswa(S1)  
: Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36, Samata Gowa

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

**" EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (STUDI KASUS DESA BONTOSUNGGU KECAMATAN BONTOHARU KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR) "**


Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **10 Agustus s/d 10 September 2020**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.


Diterbitkan di Makassar  
Pada tanggal : 10 Agustus 2020

**A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN**  
**Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu


  
**Dr. JAYADIN SAS, S.Sos., M.Si**  
Pangkat : Pembina Tk.I  
Nip : 19710501 199803 1 004

Tembusan Yth  
1. Dekan Fak. Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar di Makassar;  
2. Perlinggal.

SIMAP PTSP 10-08-2020



Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936  
Website : <http://simap.sulselprov.go.id> Email : [ptsp@sulselprov.go.id](mailto:ptsp@sulselprov.go.id)  
Makassar 90231







**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR  
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
DAN TENAGA KERJA**

Jln. Kemiri No. 2 Benteng, 92812, Sulawesi Selatan  
Telepon (0414) 21083, email: dpmptsptk.selayar@gmail.com

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**  
**NOMOR : 64/Penelitian/VIII/2020/DIS PMPTSPTK**

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Selayar memberikan Surat Keterangan Penelitian kepada :

Nama Peneliti : NURUL MUAMMAR  
Alamat Peneliti : Padang Selatan Desa Bontosunggu Kec. Bontoharu  
Nama Penanggung Jawab : NURUL MUAMMAR  
Anggota Peneliti : -

Untuk melakukan penelitian dalam rangka "Untuk mengetahui sejauh mana efektifitas pelaksanaan pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Kepulauan Selayar" di :

Lokasi Penelitian : Inspektorat Daerah  
Judul Penelitian : Efektifitas Pelaksanaan Pemberhentian Kepala Desa Menurut UU. No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa ( Studi Kasus Desa Bontosunggu Kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar  
Lama Penelitian : 1 Bulan  
Bidang Penelitian : Hukum  
Status Penelitian : Perorangan

Surat Keterangan Penelitian ini berlaku sampai dengan tanggal 10 September 2020



Dikeluarkan : Benteng  
Pada Tanggal : 18 Agustus 2020

A.n. **BUPATI KEPULAUAN SELAYAR**

**Plt. KEPALA DINAS**

**MUHAMMAD ARSYAD, SKM, MKes, MScPH**  
NIP. 19750101 199903 1 010

Digitally signed by  
Muhammad Arsyad,  
SKM., M.Kes., M.Sc.Ph

**Rp. 0,-**

Tembusan

1. Kepala Badan Kesbangpol di Benteng
2. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

## INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Bonto No. 1, Benteng, 92812, Sulawesi Selatan  
Telp. (0414) 21144, Faximile (0414) 22661

### SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 070/ 312 /IX/2020/ITDA

Berdasarkan Surat Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Nomor : 64/Penelitian/VIII/2020/DIS PMPTSPTK, tanggal 18 Agustus 2020, perihal Surat Keterangan Penelitian, bahwa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : **NURUL MUAMMAR**  
Alamat Peneliti : **Padang Selatan Desa Bontosunggu Kec. Bontoharu**  
Bidang Penelitian : **Hukum**  
Status Penelitian : **Perorangan**

Telah melakukan penelitian pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar pada tanggal 19 Agustus s/d 10 September 2020.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Benteng, 11 September 2020

INSPEKTUR DAERAH,



**H. AR. KRG. MAGASSING, S.H., M.H**

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. 19630727 199303 1 014





M A K A S S A R

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



**Nurul Muammar**, lahir di Makassar pada hari Rabu tanggal 24 Juni 1998, terlahir sebagai anak ketiga dari empat bersaudara dari pasangan suami istri Drs. Muhammad Nursan dan Sitti Hadawiyah. Bertempat tinggal di dusun Padang Utara Desa Bontosunggu Kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar. Penulis megenyam pendidikan sekolah dasar di SDN Padang pada tahun 2004 dan lulus pada tahun 2010, kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Babussalam Selayar pada tahun 2010 dan menyelesaikan studinya pada sekolah menengah pertama pada tahun 2013, dan melanjutkan kembali studinya pada sekolah menengah atas (SMA) pada SMA Babussalam Selayar pada tahun 2013 dan lulus pada tahun 2016. Pada tahun 2016 penulis melanjutkan studinya pada perguruan tinggi negeri Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dan mengambil jurusan Ilmu Hukum pada fakultas Syari'ah dan Hukum. Berkat karunia Allah SWT penulis dapat menyelesaikan studinya pada perguruan tinggi Universitas Islam Negeri Makassar dengan menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Efektivitas Pelaksanaan Pemberhentian Kepala Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa ( Studi Kasus Desa Bontosunggu Kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar”**.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN

MAKASSAR